

**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
DIMEDIASI *GOOD GOVERNMENT*  
*GOVERNANCE***  
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen)

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Oleh :**

**YUSUF HIDAYAT  
NIM. 19.52.21.299**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERISTAS ISLAM NEGERIRADEN MAS SAID  
SURAKARTA  
2023**

**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
DIMEDIASI *GOOD GOVERNMENT*  
*GOVERNANCE***

**(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Akuntansi  
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah**

**Oleh :**

**YUSUF HIDAYAT  
NIM. 19.52.21.299**

Sukoharjo, 13 Februari 2023

Disetujui dan disahkan oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP.  
NIP. 19800712 201403 1 003**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : YUSUF HIDAYAT  
NIM : 195221299  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DIMEDIASI *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*" (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen)

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 13 Februari 2023



Yusuf Hidayat

## SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : YUSUF HIDAYAT  
NIM : 195221299  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DIMEDIASI *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*" (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen)

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data kuesioner dari pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sragen. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 13 Februari 2023



Yusuf Hidayat

Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Yusuf Hidayat

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yusuf Hidayat NIM: 19.52.21.299 yang berjudul:

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DIMEDIASI *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 13 Februari 2023  
Dosen Pembimbing Skripsi



Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP.  
NIP. 19800712 201403 1 003

**PENGESAHAN**

**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
DIMEDIASI *GOOD GOVERNMENT  
GOVERNANCE*  
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen)**

Oleh:

**YUSUF HIDAYAT**  
**NIM. 19.52.21.299**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 M / 08 Sya'ban 1444 H dan dinyatakan  
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)  
Fahri Ali Ahzar, M. Si.  
NIK. 19910513 201701 1 124



Penguji II  
Anim Rahmayati, S.E.I., M. Si.  
NIP. 19841008 201403 2 005



Penguji III  
Frank Aligarh, S. Pd., M. Sc.  
NIP. 19920912 201903 1 011



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



  
Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.  
19720304 200112 1 004

## MOTTO

“Kita memang akan memiliki waktunya masing-masing untuk berubah, tidak bisa dibandingkan atau mengikuti antara yang satu dengan yang lain. Yang terpenting adalah bukan siapa yang cepat dan siapa yang lambat, terpaksa berubah karena sebuah momentum, melainkan bagaimana kita bisa memaknai proses perjalannya”

(Yusuf Hidayat)

“Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula (kamu merasa) bersedih hati. Sebab, kamu paling tinggi derajatnya jika kamu (termasuk) orang yang beriman”

(Q.S. Al-Imran, 3:139)

“Segala sesuatu butuh waktu. Segala sesuatu butuh alasan kuat untuk bisa terjadi. Jika sampai saat ini mimpimu tak kunjung diamini semesta, mungkin pintamu hanya dipeluk tuhan lebih lama agar melihat seberapa kuat kamu meminta, seberapa besar perjuanganmu disana”

(Salsabila Syifani Nugroho)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan”

(HR Tirmidzi)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'aalamin*

Kupersembahkan dengan penuh cinta karya ilmiah sederhana ini kepada:

Bapak dan Ibu yang tercinta. Terimakasih atas segala do'a yang senantiasa dilangitkan dan selalu menyertai setiap langkahku. Terimakasih atas kasih sayang tulus yang diberikan hingga saat ini. Terimakasih atas dukungan moral dan finansial yang telah diberikan. Terimakasih telah mengajarkan arti berjuang dan mensyukuri hidup ini. Bapak dan ibu menjadi alasan dan motivasiku untuk terus berjuang dan melangkah menggapai cita dan cinta Allah SWT.

Teman-teman satu angkatan dan sahabat-sahabat *ahlul jannah* : Nurhadi, Hanif Burhanudin, Seftya Budi Firdaus, Mustofa Abdillah, Gus Nuril Arifin, Hasan Ahmadi, Susan Azis, Octavia Tri Utami, dan Noval Bagus Safrizal. *Thank you* untuk segala yang telah menerima dan membantu dengan sepenuh hati. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita dan kisah hidupku di dunia ini. Semoga persahabatan kita bertahan hingga ke Surga-Nya Allah. Terima kasih atas dukungan dari kalian yang selalu menyertaiku sehingga saya dapat melalui setiap proses dalam menempuh pendidikan di kampus islami menjadi lebih bermakna dan berwarna.

UIN Raden Mas Sa'id Surakarta

Terima kasih telah menjadi tempat sekaligus wadah bagi saya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Menjadi bagian dari keluarga besar kampus tercinta UIN Raden Mas Sa'id Surakarta merupakan suatu anugerah terbaik dari Allah SWT.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur terhadap Allah SWT yang telah melimpahkan curahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi *Good Government Governance*” (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Sragen). Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Fitri Laela Wijayati, S.E, M.Si, selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ade Setiawan, M.Ak., CRA., CRP., CIAP, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu kepada penulis,

bimbingan, saran, serta perhatiannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Muntoha dan Aprillia Dwi Astuti yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat dan pengorbanan yang tidak akan pernah terlupakan.
7. Kepada Nenekku yang selalu memberikan perhatian, dukungan, doa, nasihat dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku tersayang yang selalu memberikan keceriaan, perhatian, nasihat, doa dan semangat yang sangat berkesan dan berarti bagi penulis.
9. Teman-teman angkatan tahun 2019 yang telah memberikan keceriaan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, serta batuan selama menyelesaikan skripsi.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 08 Februari 2023

Penulis

## **ABSTRACT**

*This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of accounting information system, internal control system, and human resource competence on the quality of financial report mediated by good government governance” (Empirical study on SKPD in Sragen district).*

*The data used in this research is primary data. The population in this study is the Regional Work Unit (SKPD) in Sragen Regency. The sample for this research was taken using a purposive sampling method, with a sample of 75 respondents from 25 OPD in Sragen Regency. This study uses a survey method. The research data analysis method uses Structural Equation Modeling- Partial Least Square (SEM-PLS).*

*The results of this study indicate that accounting information system and human resource competence affect the quality of regional financial report and the internal control system does not affect the quality of regional financial report. The internal control system affects good government governance and accounting information systems and human resource competencies do not affect the quality of regional financial report.*

*The results of the mediation test state that good government governance mediate the influence of accounting information system and human resource competence on the quality of regional financial report. Meanwhile, good government governance does not mediate the internal control system on the quality of financial report.*

**Keywords:** *Accounting Information System, Internal Control System, Competence of Human Resource, Good Government Governance, Quality of Financial Report.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dimediasi *good government governance*” (Studi empiris pada SKPD kabupaten sragen).

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini yaitu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sragen. Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling, dengan sampel sebanyak 75 responden dari 25 OPD di Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode survei. Metode analisis data penelitian menggunakan *Structural Equation Modeling- Partial Least Square* (SEM-PLS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi serta kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *good government governanc* dan sistem informasi akuntansi serta kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil uji mediasi menyebutkan bahwa *good government governance* memediasi pengaruh antara sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan *good government governance* tidak memediasi sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

**Kata kunci:** Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Good Government Governance*, Kualitas Laporan Keuangan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN PERNYAATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN .....	iv
HALAMAN NOTA DINAS .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Batasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Masalah .....	10

1.6	Manfaat Penelitian .....	12
1.7	Jadwal Penelitian .....	13
1.8	Sistematika Skripsi .....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....		15
2.1	Kajian Teori.....	15
2.1.1	Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	15
2.1.2	Teori Kepatuhan .....	16
2.1.3	Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	17
2.1.4	Sistem Informasi Akuntansi .....	18
2.1.5	Sistem Pengendalian Internal .....	20
2.1.6	Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	20
2.1.7	<i>Good Government Governance</i> .....	21
2.2	Hasil Penelitian yang Relevan.....	23
2.3	Kerangka Berfikir .....	30
2.4	Hipotesis .....	30
2.4.1	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	30
2.4.2	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	31

2.4.3	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	32
2.4.4	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap <i>Good Government Governance</i> .....	33
2.4.5	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap <i>Good Government Governance</i> .....	34
2.4.6	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap <i>Good Government Governance</i> .....	35
2.4.7	Pengaruh <i>Good Government Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	36
2.4.8	<i>Good Government Governance</i> Memediasi Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	37
2.4.9	<i>Good Government Governance</i> Memediasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	38
2.4.10	<i>Good Government Governance</i> Memediasi Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1	Waktu dan Wilayah Penelitian .....	40
3.2	Jenis Penelitian .....	40
3.3	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	40
3.4	Data dan Sumber Data.....	43

3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6	Variabel Penelitian .....	43
3.7	Definisi Operasional Variabel .....	44
3.8	Teknik Analisis Data .....	46
3.8.1	Instrumen Penelitian .....	47
3.8.2	Pengujian Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	47
3.8.3	Pengujian Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	48
3.8.4	Analisis Mediasi SEM-PLS .....	49
3.8.5	Hipotesis .....	50
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....		52
4.1	Gambaran Umum Penelitian.....	52
4.1.1	Deskripsi Karakteristik Responden .....	54
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data .....	56
4.2.1	Uji Instrumen Penelitian .....	56
4.2.2	Pengujian Pengukuran Model ( <i>Outer Model</i> ).....	56
4.2.3	Pengujian Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	59
4.2.4	Uji Hipotesis .....	60
4.3	Pembahasan Hasil Analisis Data .....	66
4.3.1	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	66



4.3.2	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	68
4.3.3	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	70
4.3.4	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap <i>Good Government Governance</i> .....	71
4.3.5	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap <i>Good Government Governance</i> .....	73
4.3.6	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap <i>Good Government Governance</i> .....	75
4.3.7	Pengaruh <i>Good Government Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	76
4.3.8	<i>Good Government Governance</i> Memediasi Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	78
4.3.9	<i>Good Government Governance</i> Memediasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	80
4.3.10	<i>Good Government Governance</i> Memediasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	81
BAB V PENUTUP .....		84
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	86

5.3	Saran.....	87
	DAFTAR PUSTAKA .....	88
	LAMPIRAN .....	93

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Opini LKPD Kab. Sragen Tahun 2016-2020...	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel .....	44
Tabel 4.1	Data Sampel Penelitian .....	54
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	55
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	55
Tabel 4.4	Validitas Konvergen.....	57
Tabel 4.5	Uji Validitas Diskriminan.....	58
Tabel 4.6	Uji Reliabilitas .....	59
Tabel 4.7	Nilai R-Square .....	60
Tabel 4.8	Uji Hipotesis .....	62
Tabel 4.9	Direct Effect.....	64
Tabel 4.10	Inderrect Effect .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir Penelitian .....	30
Gambar 3.1	Model Direct Effect.....	49
Gambar 3.2	Model Indirect Effect .....	49
Gambar 4.1	Model Struktural .....	56
Gambar 4.2	Output Bootstrapping .....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jadwal Penelitian.....	94
Lampiran 2	Surat Balasan Penelitian .....	96
Lampiran 3	Kuesioner Penelitian .....	99
Lampiran 4	Data Penelitian .....	105
Lampiran 5	Hasil Uji Validitas Konvergen.....	108
Lampiran 6	Uji Validitas Driskiminan.....	116
Lampiran 7	Uji Reliabilitas .....	117
Lampiran 8	Direct Effect & Inderect Effect.....	118
Lampiran 9	Daftar Riwayat Hidup .....	119
Lampiran 10	Bukti Cek Plagiasi.....	119

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Meningkatnya permintaan masyarakat akan laporan keuangan keuangan berkualitas dan berkaitan dengan pemerintahan yang baik semakin diperhatikan. Diperlukan adanya pergeseran paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah yang baru, baik dalam tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Untuk memastikan agar pengguna dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta memahami sistem akuntansi, khususnya dalam akuntansi keuangan daerah (Ghozali, 2018)(Pratiwi, Agusady, & Saepudin 2022).

Gambaran konseptual yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bukti dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan suatu negara. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan haruslah informatif dan terbuka terhadap semua informasi. Agar memberikan informasi yang baik dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, hal tersebut juga harus memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevan, bisa diandalkan, bisa dibandingkan, dan mudah dipahami (Tawaqal & Suparno, 2017).

Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang keuangan entitas pelaporan, pengguna dapat menilai kinerja keuangan entitas tersebut, memahami tingkat risiko, dan menentukan kemungkinan

entitas tersebut dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka di masa depan serta membuat akan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya (Tawaqal & Suparno, 2017).

Laporan keuangan pemerintah memegang peranan yang sangat penting bagi penggunaannya, sehingga informasi yang dihasilkan haruslah berkualitas baik. Menurut Sumaryati, Novitasari & Machmudah (2020) untuk mencapai hal tersebut, suatu instansi harus memiliki kualitas sistem informasi, khususnya sistem informasi akuntansi. SIA bertujuan untuk menunjukkan informasi keuangan yang berkualitas baik dan terpercaya. Dengan memiliki kualitas sistem informasi akuntansi, pemerintah daerah bisa menunjukkan laporan keuangan yang akurat & dapat dipercaya, sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik (Juwita, 2013).

Ridzal, Sujana, & Malik (2022) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Temuan tersebut sejalan Juwita, (2013), Sonia, (2016) serta Tawaqal & Suparno, (2017). Namun perbedaan hasil diperoleh oleh penelitian Budiawan & Purnomo, (2014) serta Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020) yang menemukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal juga merupakan faktor yang dapat menjadi pengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah. Darmawan & Darwanis, (2018) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki tujuan untuk membantu organisasi mencapai efektivitas dan efisiensi melalui kegiatan yang tepat

dan terencana. Selain itu, Sistem Pengendalian Internal juga bertujuan untuk memastikan keandalan akan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan mematuhi akan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penting bagi suatu organisasi untuk menerapkan pengendalian internal agar berkesinambungan untuk meminimalkan kesalahan dan risiko serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan (Gasperz, 2019).

Penelitian mengenai hubungan sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh Ridzal, Sujana, & Malik (2022) yang memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Tawaqal & Suparno, (2017), Darmawan & Darwanis, (2018), Gasperz, (2019) serta Sundari & Rahayu, (2019). Namun perbedaan hasil penelitian diperoleh oleh Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020) serta Sabatiah & Bustami, (2020) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor lainnya yang dapat berhubungan dengan kualitas laporan keuangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) dalam pengelolaan laporan keuangan merupakan faktor kunci terciptanya integritas keuangan (Sumaryati, Novitasari, & Machmudah 2020). Menurut Sundari & Rahayu, (2019) laporan keuangan disusun memerlukan sumber daya manusia yang bisa memahami proses akan pelaksanaan akuntansi dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sumber daya manusia yang kompeten juga bisa



memberikan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik bagi organisasi.

Penelitian yang menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan telah dilaksanakan oleh Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020) yang memperoleh hasil pada kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Darmawan & Darwanis, (2018), Gasperz, (2019), Tawaqal & Suparno, (2019) serta Sundari & Rahayu, (2019). Namun hasil tersebut tidak konsisten akan penelitian Merlyn, Kalumata, & Ilat, (2015) serta Sriyono, (2020) yang mendapatkan hasil bahwa tidak berpengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan yang baik yaitu perlu adanya *good government governance*. Menurut Azzindani & M. Irwan, (2020) *Good Governance Governance (GGG)* memberikan peran penting akan penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi akan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi peran penting untuk menjukkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Secara konseptual, *Good Governance Governance* mengandung dua pemahaman yang saling terkait. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak masyarakat, sehingga pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Kedua, nilai-nilai untuk meningkatkan kemampuan masyarakat akan mencapai tujuan pembangunan

berkelanjutan, seperti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Yusniyar, Darwanis, & Abdullah 2016).

Penelitian yang dilakukan Azzindani & M. Irwan, (2020) menemukan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan oleh Oktariana, Raharjo, & Andini (2016) serta Yusniyar, Darwanis, & Abdullah (2016) menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penerapan prinsip-prinsip *good government governance*, penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terlepas dari masalah akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah berkualitas.

Setiap tahun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dinilai oleh BPK dan diberikan opini. Jika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, hal ini menandakan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah tersebut telah disajikan dengan cara yang wajar dan berkualitas (Tawaqal & Suparno, 2017).

Berdasarkan data Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, yang tertuang atas 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada IHPS 1 Tahun 2021 dalam rentang waktu 5 tahun terakhir antara tahun 2016-2020 tentang opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah mengalami perbaikan (IHPS I 2021).

Laporan Pemerintah Keuangan Daerah (LPKD) yang memperoleh opini WTP naik sebesar dari 70% di LKPD Tahun 2016 menjadi 90% di LKPD Tahun 2020. Sedangkan jumlah LKPD yang memiliki opini TMP mengalami penurunan dari 4% di LKPD Tahun 2016 menjadi 0,7% pada LKPD Tahun 2020. Meskipun demikian, di LKPD Tahun 2020 terdapat 2 (0,3%) LKPD yang memperoleh opini TW dimana pada 4 tahun sebelumnya tidak pernah ada LKPD yang memperoleh opini TW (IHPS I 2021).

Namun dalam fakta lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI pada Semester 1 tahun 2021 dalam IHPS, terhadap 541 LKPD tahun 2020 menyebutkan terdapat 5.367 kasus terkait kelemahan sistem pengendalian internal. Dalam pemeriksaan keuangan, kelompok temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terdapat kelemahan pengendalian akuntansi pelaporan, pengendalian akuntansi dan keuangan, serta struktur pengendalian internal. Temuan tersebut terdapat dalam kelemahan sistem pengendalian akan laporan keuangan.

BPK menemukan beberapa masalah dalam sistem pengendalian internal yang terkait dengan sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, kurangnya dukungan dari sumber daya manusia yang memadai untuk sistem informasi akuntansi dan pelaporan, juga keterlambatan dalam penyampaian laporan oleh entitas tersebut. Terdapat 161 Pemerintah Daerah, salah satunya Kabupaten Sragen untuk tahun anggaran 2020 (IHPS I 2021).

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sebagai salah satu entitas pelaporan berkewajiban untuk menyusun dan menyajikan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) akan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah). Salah satu indikasi terwujudnya akuntabilitas dapat dilihat dari opini atas LKPD yang diperoleh. Pada hasil pemeriksaan BPK dalam IHPS 1 Tahun 2021, kabupaten sragen menjadi salah satu pemerintah daerah yang memiliki opini WTP dari tahun 2016-2020.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Opini LKPD Kab. Sragen Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Opini LKPD Kab. Sragen</b>
2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: BPK RI, 2021

Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen walaupun sudah memperoleh opini WTP masih ada catatan terjadinya penyimpangan yang belum berhasil terungkap. Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen Tahun 2020 menemukan adanya SKPD yang kurang teliti dalam proses penyusunan perencanaan belanja yang dituangkan dalam DPA SKPD, sehingga dalam perjalanannya masih ada SKPD yang mengusulkan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan maupun proses pencairannya tertunda (LHP-LKPD Sragen).

Penelitian ini dilakukan dari Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020) yang berjudul *Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia* memberikan hasil penelitian sistem informasi akuntansi & sistem

pengendalian internal tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Secara spesifik penelitian ini menambahkan variabel intervening yaitu *good government governance* yang diambil dari penelitian Azzindani & M. Irwan, (2020) untuk menguji hubungan antara pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Selain itu, penelitian ini dilakukan karena adanya sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki perbedaan hasil penelitian Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020) yaitu terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik akan melakukan penelitian tentang, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi *Good Government Governance*” (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Sragen).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kelemahan sistem pengendalian internal di beberapa Pemerintah Kabupaten yang belum menciptakan keefektifan dan keefisienan terhadap penyajian laporan keuangan yang komprehensif.
2. Beberapa penelitian sebelumnya tidak konsisten akan hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan pengujian kembali dengan menambahkan variabel intervening yaitu *good government governance*.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini menguji variabel sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan *good government governance* sebagai variabel mediasi terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten Sragen.
2. Penelitian ini hanya pada Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sragen.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sajikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
4. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap *good government governance*?
5. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *good government governance*?
6. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap *good government governance*?
7. Apakah *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
8. Apakah *good government governance* mampu memediasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
9. Apakah *good government governance* mampu memediasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
10. Apakah *good government governance* mampu memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

### **1.5 Tujuan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4. Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap *good government governance*.
5. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap *good government governance*.
6. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap *good government governance*.
7. Untuk menganalisis pengaruh *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
8. Untuk menganalisis apakah *good government governance* mampu memediasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
9. Untuk menganalisis apakah *good government governance* mampu memediasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
10. Untuk menganalisis apakah *good government governance* mampu memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.



## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Mahasiswa prodi akuntansi, penelitian ini bermanfaat untuk bahan referensi akan penelitian selanjutnya, dan menjadi perbandingan untuk menambah ilmu pengetahuan terkait sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, dan *good government governance*.
  - b. Penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan serta menambah referensi terkait kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan akan memberikan manfaat dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis :
  - a. Pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, dan menjadi bahan evaluasi serta masukan untuk meningkatkan kualitas informasi dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - b. Masyarakat, sebagai sarana dalam menambah ilmu pengetahuan serta informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya penyajian

laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota serta kualitas informasi atas laporan tersebut.

### **1.7 Jadwal Penelitian**

*Terlampir*

### **1.8 Sistematika Skripsi**

Penulisan penelitian ini dibuat berdasarkan pada sistematika dalam panduan penulisan karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memaparkan uraian kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, instrument penelitian dan teknik analisis data.

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis data.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diperuntukkan bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan atau *agency theory* menurut Jensen, MC, & Meckling dalam Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020) agensi dapat didefinisikan sebagai hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana terdapat dua atau lebih individu dalam suatu kelompok organisasi. Dalam agensi, pihak prinsipal adalah pihak yang mengambil keputusan dan memberikan mandat kepada pihak lain (agen) untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal.

Menggunakan teori ini dijelaskan adanya hubungan antara masyarakat menjadi prinsipal dan pemerintah menjadi agen (Sumaryati, Novitasari, & Machmdah 2020). Dalam hal ini pemerintah bertindak menjadi agen mempunyai keharusan menyampaikan informasi yang berguna untuk pemegang laporan keuangan yang bertindak menjadi principal untuk menilai akuntabilitas pemerintah dan melakukan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga politik. (Modo, Saerang, & Poputra 2016).

Mardiasmo, (2018) akuntabilitas publik dijelaskan untuk kewajiban bagi pihak yang memegang kepercayaan atau agent, dan dapat pertanggungjawaban serta melaporkan atas aktivitas akan pihak pemberi kepercayaan atau principal. Principal mendapatkan hak untuk meminta pertanggungjawaban dari agent tersebut. Konsep akuntabilitas publik terdapat dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal terkait dengan

pertanggungjawaban akan pengelolaan dana pada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal berkaitan dengan pertanggungjawaban pada masyarakat luar.

Masalah yang menjelaskan praktik keagenan dan keuangan untuk organisasi sektor publik adalah desain yang didasarkan pada teori keagenan. Laporan keuangan digunakan pemerintah yang menjadi agen memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang menguntungkan bagi pengguna laporan keuangan dan masyarakat sebagai prinsipal. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas pemerintah dan membantu pengambilan keputusan, baik politik, sosial, maupun ekonomi, secara langsung atau tidak langsung melalui wakilnya. Keterkaitan keagenan akan pemerintahan yang demokratis digambarkan dengan keterkaitannya pemerintah dan setiap pengguna informasi keuangan (Sumaryati, Novitasari, & Machmudah, 2020).

### **2.1.2 Teori Kepatuhan**

Teori kepatuhan adalah teori yang menyatakan bahwa setiap instansi berkewajiban untuk mematuhi peraturan karena pembuat undang-undang memiliki hak untuk mendikte perilaku (normatif melalui legitimasi/komitmen normatif melalui legitimasi). Menurut Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020) teori kepatuhan telah diteliti dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya di bidang sosiologi dan psikologi, yang lebih menitikberatkan pada perlunya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

Ada dua perspektif dalam teori kepatuhan, yaitu perspektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental melibatkan seseorang yang sepenuhnya didorong

oleh keutamaan individu dan reaksi akan perubahan situasi atau kondisi. Perspektif normatif, di sisi lain, melibatkan norma sosial dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan standar masyarakat, sedangkan perspektif normative adalah perspektif yang berhubungan dengan moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi. Berdasarkan perspektif normatif, teori kepatuhan harus diterapkan dalam akuntansi (Sumaryati, Novitasari, & Machmudah, 2020).

Teori kepatuhan menekankan pada pengaruh suatu proses sosialisasi untuk mempengaruhi integritas kepatuhan seseorang atau individu itu sendiri. Dilihat dari perspektif normative dalam teori kepatuhan, teori ini dapat diterapkan pada aspek akuntansi. Kepatuhan suatu instansi atau lembaga pelapor untuk melaksanakan laporan pertanggungjawaban (Shintia & Erawati, 2017).

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Kartika & Amalia, (2018) menyatakan bahwa nilai informasi adalah kemampuan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan oleh penggunanya. Hal ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pengguna, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Sejalan dengan definisi tersebut, Gasperz, (2019) Informasi yang memiliki nilai dapat berupa informasi praktis, seperti cara melakukan suatu tugas dengan lebih efisien, atau informasi yang membantu pengambilan keputusan, seperti informasi tentang layanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Mansur, Prasetyo, & Maiyarni (2017) mengatakan bahwa suatu informasi dikatakan mempunyai nilai apabila informasi tersebut:

1. Menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, atau masa mendatang.
2. Menambah keyakinan para pengguna mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian.
3. Mengubah keputusan atau perilaku para pengguna.

Nilai informasi laporan keuangan pemerintah mempunyai karakteristik kualitatif yang ditentukan. Karakteristik kualitatif merupakan ukuran normatif yang membuat laporan keuangan tersebut memiliki nilai (Sonia, 2016). Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah pada Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

#### **2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi**

Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, suatu entitas harus menggunakan sistem informasi akuntansi. Terdapat berbagai pandangan mengenai definisi dari sistem informasi akuntansi, salah satunya Bornard dan Hopwood dalam Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020) sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan teknologi informasi, prosedur, dan kebijakan yang digunakan oleh sebuah entitas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan secara akurat dan tepat waktu.

Menurut Daud & Windana, (2014) Terdapat beberapa cara atau langkah dalam penyusunan sistem informasi akuntansi, di antaranya:

1. Sistem informasi akuntansi mempunyai kecepatan, yaitu dapat menampilkan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat waktu, serta memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Sistem informasi akuntansi mempunyai keamanan, artinya sistem informasi dapat membantu jaminan keamanan aset perusahaan atau aset daerah.
3. Sistem informasi akuntansi mempunyai efisiensi biaya, yang artinya biaya untuk mengoperasikan sistem informasi akuntansi dapat ditekan agar tidak terlalu mahal.

Hal sependapat juga diberikan oleh Susanto, (2004) yang merupakan kumpulan subsistem yang terintegrasi dan saling berkaitan untuk mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan akurat untuk membantu pengambilan keputusan akan proses pengambilan keputusan. Menurut Krismiaji, (2010) sebuah sistem yang mengolah data laporan untuk menunjukkan informasi yang berguna dalam merencanakan, mengendalikan, dan memproses laporan tersebut.

Sistem informasi akuntansi memiliki beberapa unsur penting yang menjadi ukuran untuk petugas akuntansi yang mengoperasikan tugas-tugasnya. Setyowati, Isthika, & Pratiwi (2016) mengungkapkan terdapat unsur-unsur, antara lain:

1. Pengelompokkan
2. Pengklasifikasian
3. Pencatatan



### **2.1.5 Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah yaitu proses integral dari tindakan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai bisa memberikan keyakinan memadai akan pencapaian tujuan organisasi dalam aktivitas yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan andal, pengamanan aset negara, dan ketaatan akan peraturan yang berlaku.

Husna & Nurul, (2017) menyatakan SPIP diterapkan untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya pada instansi. SPIP juga penting untuk pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Tawaqal & uparno, (2019) menyebutkan sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dapat keyakinan yang memadai pada manajemen bahwa tujuan organisasi tercapai sasarnya yang sudah dikerjakan di organisasi pemerintah, antara lain:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Ekonomis

### **2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Byham *et al.*, (1996) dalam Efendi, (2019) kompetensi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan perilaku spesifik yang diperlukan dan dapat diandalkan oleh seseorang untuk mencapai target perusahaan dan sukses dalam melaksanakan peran mereka. Selanjutnya, konsep kompetensi terdapat kombinasi perilaku antara pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik yang dibutuhkan agar individu dapat

memainkan peran mereka pada organisasi secara efektif dan menghasilkan kinerja yang baik dengan tujuan organisasi.

Kompetensi meliputi sejumlah atribut yang melekat pada individu sebagai kombinasi pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang dapat meningkatkan kinerja. Jika kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan sistem akuntansi yang diperlukan tidak memilikinya, hal itu dapat timbul hambatan akan pelaksanaan guna akuntansi, dan informasi akuntansi yang digunakan dari sistem akuntansi, menjadi buruk akan kualitasnya.

Kompetensi sumber daya manusia memiliki kapasitas dari kemampuan individu dalam organisasi yang menjalankan fungsinya serta kewenangannya secara efektif dan efisien, hal itu bisa mencapai tujuannya dengan baik. (Husna & Nurul, 2017). Kapasitas tersebut mengukur kemampuan untuk mencapai kinerja yang dibutuhkan, menunjukkan keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) yang diinginkan (Sonia, 2016).

Sejalan dengan definisi kompetensi menurut Setyowati, Isthika, & Pratiwi (2016) bahwa komponen-komponen yang membentuk sebuah kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan
2. Keterampilan
3. Kemampuan

### **2.1.7 Good Government Governance**

*Good government governance (GGG)* sebagaimana didefinisikan oleh *World Bank* di dalam Mardiasmo, (2018) yaitu: “*The way state power is used in*

*managing economic and social resources for development of society*”. Artinya: suatu cara pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Sementara menurut *United Nation Development Program (UNDP)* dalam Mardiasmo, (2018) mendefinisikan *good government governance* sebagai: “*The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara.

Menurut Azzindani & M. Irwan, (2020) *good government governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu, sehingga *good government governance* berperan penting dalam meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* pada sektor publik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep *good government governance* harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu Negara (*state*)/pemerintah (*government*), swasta (*private*), dan masyarakat (*society*) (Dhiyavani, 2017).

Menurut Arie Soelendro (2000) dalam Saragih, (2014) Prinsip-prinsip *good government governance* tersebut dalam akuntansi sektor publik berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik yaitu:

1. Partisipasi
2. Akuntabilitas
3. Integritas

## 2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun hasil-hasil dari sebelumnya dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Tawaqal & Suparno, 2017)	Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia Terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah di pemerintah kota banda aceh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitatif.</li> <li>2. Sampel 78 responden.</li> <li>3. Populasi dalam penelitian ini adalah 39 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknik analisis yang digunakan adalah pengujian pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik, melakukan analisis regresi linear berganda, melakukan pengujian hipotesis.</li> </ol>	Hasil ini membuktikan bahwa Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas keuangan laporan keuangan.
2	(Sundari & Rahayu, 2019)	Pengaruh Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitatif.</li> </ol>	Hasil pengujian secara simultan,

		Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sampel 100 responden.</li> <li>3. Populasi dalam penelitian ini adalah 46 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).</li> <li>4. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda.</li> </ol>	bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. namun, hasil pengujian secara parsial bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3	(Amijaya, 2019)	Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan <i>good government governance</i> sebagai variabel intervening (studi kasus pada organisasi perangkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitatif.</li> <li>2. Sampel 29 responden.</li> <li>3. Populasi dalam penelitian ini adalah semua kepala sub bagian keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat.</li> <li>4. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, diolah menggunakan</li> </ol>	Hasil ini membuktikan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan <i>good government governance (GGG)</i> sebagai variabel intervening secara simultan, Terdapat pengaruh pada sistem pengendalian internal terhadap <i>good government governance</i> sebagai variabel intervening secara parsial. <i>Good</i>

		daerah kabupaten bandung barat)	bantuan <i>software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 17.</i>	<i>government governance</i> sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	(Gasperz, 2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitatif.</li> <li>2. Sampel 57 responden.</li> <li>3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang menangani akuntansi/laporan keuangan pada entitas akuntansi di lingkungan Badan Pusat Statistik wilayah Maluku.</li> <li>4. Analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda.</li> </ol>	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
5	(Sabatiah & Bustami, 2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Bakeuda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitatif</li> <li>2. Sampel 22 responden.</li> <li>3. Populasi dalam penelitian ini adalah 41 orang Aparatur Sipil Negara di BAKEUDA Kota Sungai Penuh.</li> <li>4. Teknis analisis data menggunakan regresi linier</li> </ol>	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern (X1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y), terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah (X2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

		Kota Sungai Penuh	berganda, koefisien determinasi, uji F dan uji T.	
6	(Philadhelphia, Suryaningsum, & Sriyono, 2020)	<i>The Effect Of Human Resources Competency, Government Accounting Standards, Good Governance, And Internal Control Systems On The Quality Of Local Government Financial Statements</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitatif.</li> <li>2. Sampel 95 responden.</li> <li>3. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan daerah pada setiap OPD Kabupaten Klaten khususnya sub bagian keuangan beserta seluruh staf/pegawai dengan jumlah 20 OPD dengan rincian 16 Dinas dan 4 Badan.</li> <li>4. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS (<i>Statistical Product and Service Solutions</i>) versi 20.</li> </ol>	Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, <i>Good governance</i> berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
7	(Azzindani & M. Irwan, 2020)	Pengaruh Implementasi Simda Dan Kinerja Aparatur Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitatif.</li> <li>2. Sampel 160 responden.</li> <li>3. Populasi penelitian merupakan</li> </ol>	Implementasi SIMDA tidak berpengaruh terhadap <i>good government governance</i> , namun

		Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi <i>Good Government Governance</i>	seluruh pegawai pada 32 OPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. 4. Prosedur analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji kualitas data.	berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap <i>good government governance</i> , namun tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
8	(Sumaryati, Novitasari, & Machmudah 2020)	<i>Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia</i>	1. Kuantitatif. 2. Sampel 106 responden. 3. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan organisasi pemerintah daerah di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, Indonesia. 4. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda.	Berdasarkan hasil tersebut, bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas LK. Namun penerapan SIA dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas LK di Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.
9	(Aguswen, Ridha, & Astuti 2020)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi	1. Kuantitatif. 2. Sampel 73 responden. 3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada SUPM Ladong	Kesimpulannya adalah sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh



		Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten Aceh Besar. 4. Teknik analisis data yang digunakan adalah angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik untuk menguji kebenaran hipotesis.	terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan secara parsial, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia tidak ada yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
10	(Safrin & Pratiwi, 2021)	Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan <i>good government governance</i> sebagai variabel intervening (studi pada bpkad kabupaten buton tengah)	1. Kuantitatif. 2. Sampel 42 responden. 3. Populasi dari pegawai yang ada di kantor BPKAD Kabupaten Buton Tengah. 4. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.	Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan diterima, pengaruh <i>good governance governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan diterima, pengaruh sistem pengendalian intern dan <i>good government governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan diterima.
11	(Hasanah & Siregar, 2021)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi	1. Kuantitatif. 2. Sampel 60 responden. 3. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat pengelola keuangan/kasub bag, bendahara dan staf pembantu penyusun	Standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh negative terhadap kualitas laporan keuangan, Sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh negative terhadap kualitas laporan keuangan, Sistem pengendalian intern tidak memiliki

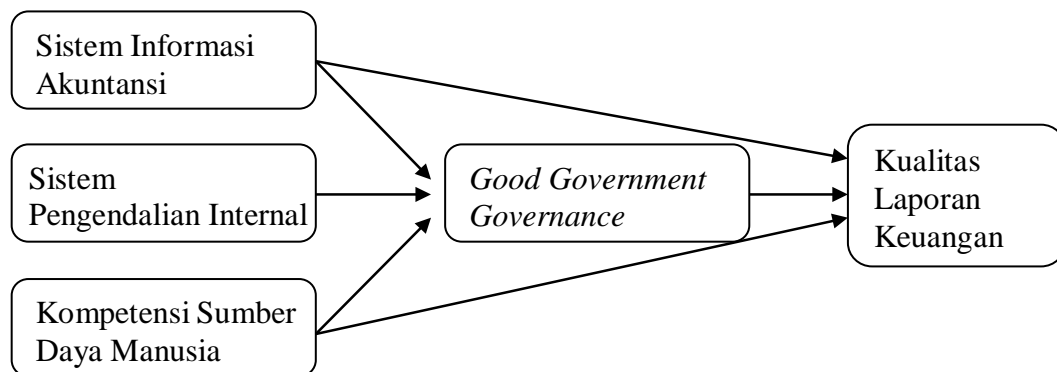
		Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhan Batu	laporan keuangan di seluruh OPD Labuhanbatu. 4. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.	pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
12	(Ridzal, Sujana, & Malik 2022)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan	1. Kuantitatif. 2. Sampel 132 responden. 3. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian pengelola keuangan pada 33 dinas di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. 4. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan software SPSS.	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
13	(Aziyah & Yanto, 2022)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi	1. Kuantitatif. 2. Sampel 88 responden. 3. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang berjumlah 44 perangkat daerah.	Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan,

		Sumber Daya Manusia sebagai <i>Variabel Moderating</i>	4. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, regresi linier berganda, dan regresi moderasi.	kompetensi sumber daya manusia tidak mampu memoderasi hubungan sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan.
--	--	--	--	---

### 2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir Penelitian**



### 2.4 Hipotesis

#### 2.4.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengkompilasi data untuk memberikan informasi yang berguna akan desain, pengawasan, dan operasi bisnis (Tawaqal & Suparno, 2017). Pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi

dan terkomputerisasi, proses pengolahan data keuangan dapat dilakukan dengan lebih akurat, maka memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pihak terkait (Diani, 2014). Dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem informasi akuntansi suatu instansi, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga menjadi lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sonia, (2016), Tawaqal & Suparno, (2017), Ridzal, Sujana, & Malik, (2022) menemukan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Maka penerapan sistem informasi yang baik akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan untuk memperoleh opini WTP oleh badan pemeriksa keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

H1 : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

#### **2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Sistem pengendalian internal merupakan bagian integral dari langkah yang dilakukan teruntun dari pimpinan dan karyawan agar menciptakan tujuan organisasi yang baik dan dapat memastikan keandalan laporan keuangan dan pengamanan aset organisasi (Sumaryati, Novitasari, & Machmudah 2020). Pengendalian internal dilakukan organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang

berhubungan dengan pengamanan aktiva dan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang baik dan oleh karenanya dirancang untuk memberikan jaminan (Rusvianto, Mulyani, Yuliafitri 2018). Maka sistem pengendalian internal baik, prosedur akuntansi dapat dengan mudah diarahkan, diawasi, dan dideteksi dalam peristiwa tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Aziyah & Yanto, (2022) menemukan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Tawaqal & Suparno, (2017), Darmawan & Darwanis, (2018), Gasperz, (2019), Sundari & Rahayu, (2019) serta Ridzal, Sujana, & Malik, (2022). Sistem pengendalian internal berhubungan positif dengan kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berarti membuktikan bahwa sistem pengendalian internal yang dijalankan dengan baik dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang mendapatkan opini dari badan pemeriksa keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

H2 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

#### **2.4.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Kompetensi sumber daya manusia merupakan keahlian yang baik dalam tingkatan individu, organisasi, maupun sistem yang menjalankan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Pilander, Saerang, & Gamariel 2018). Pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan kualitas juga kompeten akan sumber daya manusia, pemerintah daerah dapat meningkatkan

efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah (Darmawan & Darwanis, 2018). Maka pegawai yang minim pengetahuan tentang tugas dan fungsinya dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Gasparz, (2019) dalam penelitiannya menemukan hasil yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Sumaryati, Novitasari, & Machmudah, (2020) serta Tawaqal & Suparno, (2019). Ini menyimpulkan kompetensi sumber daya manusia berhubungan searah dengan kualitas laporan keuangan yang baik. Semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia dapat memberikan kualitas laporan keuangan yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

H3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

#### **2.4.4 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap *Good Government Governance***

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub-sistem atau komponen yang terintegrasi baik secara fisik/non-fisik untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang berguna bagi organisasi dan pengambilan keputusan (Aguswen, Ridha, & Astuti 2020). Sistem informasi akuntansi sangat baik dilakukan sehingga pemerintah daerah dapat mewujudkan *good government governance* guna memenuhi tuntutan masyarakat dalam hal transparansi atas laporan keuangan pemerintah daerah (Azzindani & M. Irwan, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Wulan, (2020) menemukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap *good government governance*. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Saragih, (2014). Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang mampu menciptakan sistem informasi akuntansi dengan baik dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

H4 : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap *Good Government Governance*.

#### **2.4.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap *Good Government Governance***

Sistem pengendalian internal membantu organisasi dalam memastikan bahwa tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai sesuai dengan tujuan organisasi, serta menjaga agar aktivitas yang terkait dengan keuangan dan aset organisasi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Safrin & Pratiwi, 2021). Hal ini bahwa sistem pengendalian yang harus diterapkan pada lingkungan *good government governance* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kinerja pemerintah serta peningkatan laporan keuangan yang berkualitas (Yusniyar, Darwanis, & Abdullah 2016).

Nurdin, Tahar, & Nurbayani (2019) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap *good government governance*. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Yusniyar, Darwanis, & Abdullah, (2016) serta Safrin & Pratiwi, (2021). Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal searah dengan *good government governance*. Maksudnya

adalah semakin baik sistem pengendalian maka akan menciptakan *good government governance* yang baik dalam pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

H5 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap *Good Government Governance*.

#### **2.4.6 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap *Good Government Governance***

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kualitas pegawai akan menjalankan tanggung jawab yang diembankan, yang didukung oleh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai (Darmawan & Darwanis, 2018). Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan maka dapat meningkatkan *good government governance* dilingkungan pemerintah daerah.

Azzindani & M. Irwan, (2020) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa kinerja aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap *good government governance*. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Maka semakin baik kinerja pemerintah akan menciptakan *good government governance* yang berintegritas dalam pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

H6 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap *Good Government Governance*.



#### **2.4.7 Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

*Good government governance* adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat umum, dan swasta (Tullah, Apriyanti, & Wijaya 2018). Mewujudkan *good government governance* dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih sehingga laporan keuangan akan menghasilkan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan tersebut (Pratiwi, Aguseady, & Saepudin 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Tullah, Apriyanti, & Wijaya (2018) menemukan hasil bahwa *good government governance* berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Temuan tersebut sejalan dengan Philadelphia, Suryaningsum, & Suryono, (2020) serta Cahaya Putra & Romli, (2022). *Good government governance* berhubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Maka ketika penerapan *good government governance* pada pemerintah daerah semakin baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin berkualitas. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

H7 : *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

#### **2.4.8 *Good Government Governance* Memediasi Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Sistem informasi akuntansi disebut sistem untuk memberikan sesuatu pada input yang baik, serta proses output yang baik agar bisa memberikan informasi untuk pemerintah (Tawaqal & Suparno, 2017). Menurut Azzindani & M. Irwan, (2020) menjelaskan pengelola keuangan yang diangkat atau dipilih oleh atasannya bertanggung jawab untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka akuntabilitas publik guna mewujudkan *good government governance*.

Pada penelitian Azzindani & M. Irwan, (2020) mendapatkan hasil bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan yang dimediasi *good government governance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Saragih, (2014). Dapat disimpulkan dengan keberadaan *good government governance*, sistem informasi akuntansi akan mampu memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal itu menunjukkan dengan adanya *good government governnace* penerapan akuntansi pemerintahan dan kualitas informasi yang baik mampu menjamin meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

H8 : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui mediasi *Good Government Governance*.

#### **2.4.9 *Good Government Governance* Memediasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Sistem pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan keseluruhan metode atau cara serta ukuran yang dikoordinasikan dengan tujuan mengamankan harta kekayaan, meneliti keakurata dan meningkatkan efisiensi operasi melalui pengendalian terhadap proses-proses yang ada (Amijaya, 2019). Dimana tingkat keberhasilan sistem pengendalian intern ini dapat diukur dari *Good Government Governance (GGG)* yang baik, yang tercermin dalam laporan kinerja pemerintahan dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, yang nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Safrin & Pratiwi, (2021) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan yang dimediasi *good government governance*. Hasil penelitian tersebut didukung dengan (Amijaya, 2019). Maka dengan adanya pemahaman pengendalian internal melalui tata kelola pemerintah yang baik dapat mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan *good government governance* dengan adanya sistem pengendalian internal sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis untuk menciptakan kualitas laporan yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

H9 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui mediasi *Good Government Governance*.

#### **2.4.10 *Good Government Governance* Memediasi Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Kompetensi sumber daya manusia yaitu keahlian menyelesaikan tugas tanggung jawabnya dan sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi organisasi (Tawaqal & Suparno, 2017). *Good government governance* merupakan muara dari pelaksanaan otonomi daerah yang menghasilkan birokrasi yang andal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga sumber daya manusia mempengaruhi terselenggaranya *good government governance* yang menjadi isu sentral dalam pemerintahan Azzindani & M. Irwan, (2020).

Azzindani & M. Irwan, (2020) dalam hasil penelitiannya *good government governance* dapat memediasi penuh pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Maka *good government* secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Pemerintah daerah juga harus mereformasi diri dari pemerintahan akan kompeten dalam pengetahuan serta pengalaman agar tercapai pemerintahan yang bersih dan transparan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif yang dibuat sebagai berikut:

**2.4.11 H10 :** Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui mediasi *Good Government Governance*.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian**

Waktu penulis yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu penyusunan usulan penelitian sampai dengan terlaksananya laporan penelitian, yaitu awal September 2022 hingga akhir Januari 2023. Wilayah penelitian ini yang digunakan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Sragen. Berdasarkan situs resmi Kabupaten Sragen terdapat 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah salah satu metode penelitian yang dilandasi oleh filsafat positivisme, dan dipakai untuk meneliti pada populasi atau sampel yang terpilih, data dikumpulkan memakai instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik serta bertujuan untuk menguji asumsi atau hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2015). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh antara sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dimediasi *good government governance*.

### **3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang meliputi suatu objek maupun subyek dengan jumlah serta spesifik tertentu yang ditentukan oleh peneliti dan

kemudian dipelajari lalu ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini ialah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Sragen. Populasi dalam penelitian ini akan dilakukan sebanyak 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Sosial
5. Dinas Tenaga Kerja
6. Dinas Lingkungan Hidup
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
15. Dinas Arsip dan Perpustakaan
16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan & Peternakan dan Perikanan
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman

19. Badan Pertanahan Nasional
20. Inspektorat
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sampel merupakan sebagian dari kuantitas serta karakteristik dari keseluruhan populasi (Sugiyono, 2015). Penelitian ini menggunakan sampel yaitu 75 responden yang terdiri dari bagian keuangan, kepala instansi, & kasubag pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sragen. Penelitian ini dalam pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling ialah teknik yang dapat digunakan dalam menetapkan sampel penelitian berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan supaya data penelitian yang didapatkan bisa lebih representative (Sugiyono, 2015). Kriteria penentuan sampel yaitu:

1. Pegawai berstatus PNS dan non PNS.
2. Berperan dalam mempersiapkan laporan keuangan pada instansi terkait.
3. Pegawai yang terlibat langsung dalam sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Data untuk penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari objek penelitian maupun responden, baik individu ataupun kelompok (Chandarin, 2018). Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Penyebaran kuesioner penelitian ini melalui survei kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Sragen terdapat 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode survey melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner yaitu salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan maupun pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden. Kuesioner ialah teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti memahami pengukuran variabel serta apa yang dapat diharapkan dari responden (Sugiyono, 2015).

### **3.6 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditentukan oleh peneliti dengan maksud akan dipelajari guna memperoleh informasi terkait suatu hal, yang selanjutnya dapat diambil kesimpulan (Sugiyono, 2015). Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya:



1. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi sebuah akibat dari adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan daerah (Y).

2. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan perubahan dari timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2015). Variabel bebas dari penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi (X1), sistem pengendalian internal (X2), dan kompetensi sumber daya manusia (X3).

3. Variabel Intervening/Mediasi

Menurut (Sugiyono, 2015) variabel intervening (penghubung) adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel Intervening dari penelitian ini adalah *good government governance* (Z).

### 3.7 Definisi Operasional Variabel

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
1	Kualitas Laporan Keuangan	Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan,	Skenario kasus dengan indikator sebagai berikut: 1. Relevan 2. Dapat Dinilai/Dibandingkan 3. Andal	Skala Likert 1-5

		penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan Laporan Keuangan (Setyowati, Ishika, & Pratiwi 2016).	4. Dapat Dipahami (Setyowati, Ishika, & Pratiwi 2016)	
2	Sistem Informasi Akuntansi	Sistem Informasi Akuntansi merupakan subsistem atau bagian dari suatu organisasi yang memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi keuangan untuk mendukung manajemen dalam mengambil keputusan (Setyowati, Ishika, & Pratiwi 2016).	1. Pengelompokan 2. Pengklasifikasian 3. Pencatatan (Setyowati, Ishika, & Pratiwi 2016).	Skala Likert 1-5
3	Sistem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian intern adalah suatu prosedur yang merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya (Tawaqal & Suparno, 2017).	1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Ekonomis (Tawaqal & Suparno, 2017).	Skala Likert 1-5
4	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan pekerjaan dan	1. Pengetahuan 2. Ketrampilan 3. Kemampuan & Pengalaman (Setyowati, Ishika, & Pratiwi 2016).	Skala Likert 1-5

		tanggung jawab yang telah diberikan melalui modal pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang kompeten (Setyowati, Ishika, & Pratiwi 2016).		
5	<i>Good Government Governance</i>	<i>Good government governance</i> atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu, sehingga <i>good government governance</i> berperan penting dalam meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar <i>good governance</i> pada sektor public (Azzindani & M. Irwan, 2020).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi</li> <li>2. Akuntabilitas</li> <li>3. Integritas (Azzindani &amp; M. Irwan, 2020).</li> </ol>	Skala Likert 1-5

### 3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square (PLS)*. PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling (SEM)* yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghazali, (2015) *Partial Least Square (PLS)* merupakan metode analisis yang powerfull oleh karna itu tidak didasarkan

banyak asumsi. Data tidak harus berdistribusi *normal multivariate* (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama), sampel tidak harus besar. Tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten.

### 3.8.1 Instrumen Penelitian

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui *survey* lapangan dengan menggunakan kuesioner. Modifikasi skala likert digunakan dalam mengukur pendapat dari responden menggunakan empat alternatif jawaban berikut ini:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1 = Sangat Tidak Setuju | 4 = Setuju        |
| 2 = Tidak Setuju        | 5 = Sangat Setuju |
| 3 = Kurang Setuju       |                   |

### 3.8.2 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Supaya kuesioner teruji validitas serta keandalannya, akan dibutuhkan pengujian model pengukuran yaitu:

Pada Measurement Model Outer Model ini terdapat tiga komponen penting dalam menjelaskan hubungan antara indikator dengan variabel latennya, sebagai berikut :

#### 1. *Convergent Validity*

*Convergent Validity* dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan variabel laten yang ingin diukur. Namun

demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup (Ghozali, 2015).

## 2. *Discriminant Validity*

*Validitas discriminant* berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (*manifest variable*) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. cara untuk menguji *validitas discriminant* dengan indikator refleksi yaitu dengan cara membandingkan masing-masing akar kuadrat AVE terhadap nilai korelasi antar konstruk. Jika nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antara konstruk, maka dinyatakan memenuhi kriteria *discriminant validity*. (Ghozali, 2015).

## 3. *Composite Reliability*

*Composite reliability* mengukur suatu variabel laten yang nilainya harus di atas 0,70. Nilai *composite reliability* di atas 0,70 menunjukkan bahwa semua variabel laten memenuhi kriteria reliabel yang tinggi. Pengukuran AVE dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas *component score* variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan *composite reliability*. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50 (Ghozali, 2015). *Composite reliability* yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* dan *Cronbach's Alpha* (Ghozali, 2015).

### **3.8.3 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)**

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk kostruk

dependen, dan uji-t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural (Ghozali, 2015).

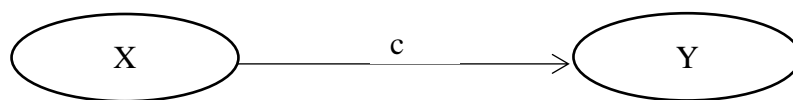
### 3.8.4 Analisis Mediasi SEM-PLS

Pendekatan alternative untuk menguji signifikansi mediasi dengan menggunakan teknik bootstrapping. Pendekatan non-parametrik yang tidak mengasumsikan bentuk distribusi variabel dan dapat diterapkan pada jumlah sampel kecil dinamakan dengan bootstrapping (Ghozali, 2018).

Analisis medias SEM-PLS ini digunakan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi (X), sistem pengendalian internal (X), kompetensi sumber daya manusia (X) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y) dengan *good government governance* (Z) sebagai variabel mediasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan 2 metode untuk menunjukkan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk model mediasi.

1. Metode Pertama (*Dirrect Effect*)

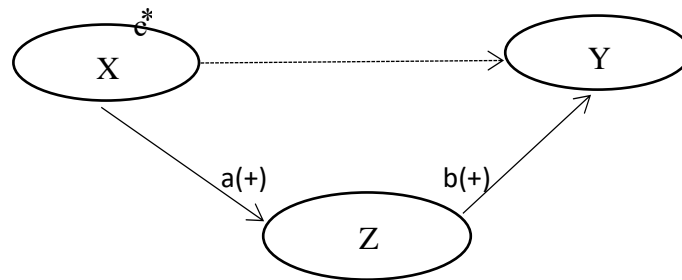
**Gambar 3. 1**  
**Model Direct Effect**



Metode ini menggunakan variabel mediasi, dengan ini menunjukkan pengaruh langsung variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

2. Metode Kedua (*Inderrect Effect*)

**Gambar 3. 2**  
**Model Indirect Effect**



Metode ini memakai variabel mediasi, dengan menggunakan ini menunjukkan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) melalui variabel mediasi (Z). Dari kedua metode ini dapat disimpulkan mengenai pengambilan keputusan tentang mediasi yakni:

- a. Jika nilai pada jalur c naik dan pada tahap dua naik dan juga tetap signifikan dan tidak berubah ( $c=c$ ), maka hipotesis mediasi tidak didukung atau 0 mediasi.
- b. Jika nilai jalur c turun ( $c < c$ ) tetapi tetap signifikan, maka bentuk mediasi adalah mediasi sebagian (*partial mediation*).
- c. Jika nilai jalur c nilainya turun ( $c < c$ ) dan tidak signifikan, maka bentuk mediasi adalah mediasi penuh (*full mediation*).

### 3.8.5 Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara analisis jalur (*Path Analysis*) atas model yang dibuat. Hasil korelasi antar konstruk diukur

dengan melihat *path coefficient* dan tingkat signifikannya yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian (Ghozali, 2014).

Hipotesis dapat dikatakan diterima atau ditolak dapat dihitung melalui signifikannya. Tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%. Dasar pengambilan keputusan yaitu P-values  $>0,05$  artinya hipotesis ditolak (Ghozali, 2014).

Untuk melakukan pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan metode *boosrapping* yang terdapat dalam *software* Warp PLS versi 3.0 dengan menggunakan angka pembangkit atau pengulang sebesar 500. Menurut Ghozali (2014) metode *boostrapping* adalah suatu metode *resampling* data sampel dengan harapan sampel tersebut mewakili data populasi sebenarnya.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data yang digunakan adalah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Sragen. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan program pengolahan data Sem-PLS. Populasi pada penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah pada kabupaten sragen. Adapun metode pemilihan sampel ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan peneliti.

Berdasarkan metode penelitian pengambilan sampel tersebut diperoleh sebanyak 75 responden yang terdiri dari kepala instansi, kasubbag, dan bagian keuangan pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten sragen. Berikut merupakan nama-nama satuan kerja perangkat daerah pada kabupaten sragen yang terpilih menjadi sampel penelitian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Sosial
5. Dinas Tenaga Kerja
6. Dinas Lingkungan Hidup
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Perhubungan
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
15. Dinas Arsip dan Perpustakaan
16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan & Peternakan dan Perikanan
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18. Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
19. Badan Pertanahan Nasional
20. Inspektorat
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan melalui survey. Penyebaran kuesioner melalui survey akan memudahkan responden untuk menjawab pernyataan maupun pertanyaan dalam kuesioner. Dalam hal ini, kuesioner disebarakan melalui survey di beberapa SKPD pada kabupaten sragen.

Berdasarkan penyebaran kuesioner kepada responden, setiap kantor memiliki kurang lebih empat karyawan dan staf di bagian akuntansi atau keuangan. Untuk selanjutnya, peneliti menyebarkan 75 kuesioner. Terdapat 9 responden yang tidak melakukan mengisi kuesioner dikarenakan sedang berada diluar negara, sehingga hanya ada 66 kuesioner yang terisi.

**Tabel 4.1**  
**Data Sampel Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Jumlah kuesioner yang disebar	75	100%
2.	Jumlah kuesioner yang kembali	66	88%
3.	Jumah kuesioner yang tidak kembali	9	12%
4.	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%
5.	Jumlah data kuesioner yang dapat diolah	66	88%

Sumber: Data diolah, 2023

Data telah disebar berjumlah 75 kuesioner dan kuesioner yang kembali sebanyak 66 kuesioner atau 88%. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 9 kuesioner atau 12%, hal ini dikarenakan adanya pegawai yang sedang sibuk dan keadaan bepergian luar kota sehingga tidak mengembalikan kuesioner yang telah diberikan. Seluruh kuesioner dapat diolah yang berjumlah 66 kuesioner atau 88%.

#### **4.1.1 Deskripsi Karakteristik Responden**

##### **1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Penyajian data primer responden penelitian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	31	47%
2.	Perempuan	35	53%
Total		66	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa komposisi responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 31 orang dari total 66 responden dengan presentase sebesar 47%, sedangkan untuk berjenis kelamin perempuan sebanyak 35 orang atau 53% dari total seluruh presentase.

## 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Penyajian data primer responden penelitian berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia Responden	Jumlah	Presentase
1.	<30	6	9%
2.	31>40	15	23%
3.	41>50	33	50%
4.	51>60	12	18%
Total		66	100%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data terkait usia yang dimiliki oleh responden dengan melihat tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden tertinggi pegawai SKPD pada kabupaten sragen ialah yang berusia 41-50 tahun sejumlah 33orang dengan presentase 50%. Sedangkan frekuensi responden

penelitian terendah ialah responden yang berusia <30 tahun sebanyak 6 orang dengan presentase 9%.

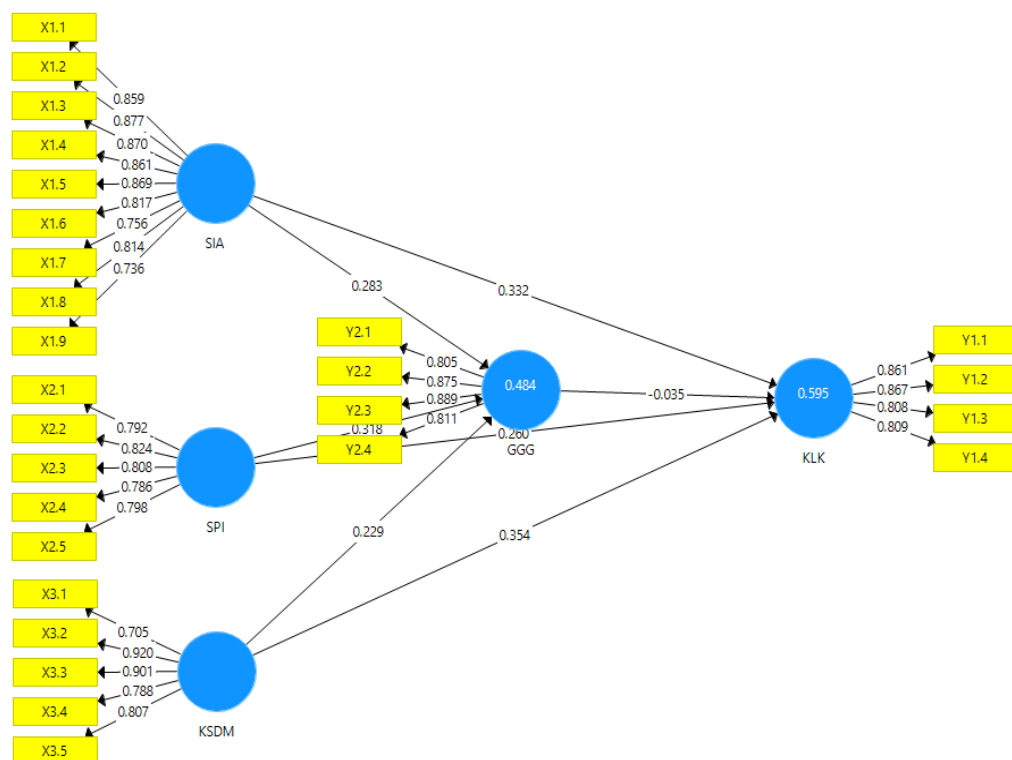
## 4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

### 4.2.1 Uji Instrumen Penelitian

### 4.2.2 Pengujian Pengukuran Model (*Outer Model*)

Analisis pengujian instrumen dalam penelitian ini dapat dilihat pada pengujian pengukuran model dari uji validitas dan reliabilitas. Hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Gambar 4. 1**  
**Model Struktural**



Sumber: Data diolah, 2023

1. Uji Validitas Kovergen (*Outer Model*)

Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas dimaksudkan untuk membuktikan bahwa instrumen tersebut telah sesuai dengan konsep penelitian untuk mengukur variabel (Ghozali, 2014: 37).

**Tabel 4.4**  
**Validitas Konvergen**

Konstruk dan Indikator	<i>Loading Factor</i>	AVE
Sistem Informasi Akuntansi		0.689
SIA1	0.859	
SIA2	0.877	
SIA3	0.870	
SIA4	0.861	
SIA5	0.869	
SIA6	0.817	
SIA7	0.756	
SIA8	0.814	
SIA9	0.736	
Sistem Pengendalian Internal		0.643
SPI1	0.792	
SPI2	0.824	
SPI3	0.808	
SPI4	0.786	
SPI5	0.798	
Kompetensi Sumber Daya Manusia		0.685
KSDA1	0.705	
KSDA2	0.920	
KSDA3	0.901	
KSDA4	0.788	
KSDA5	0.807	
Kualitas Laporan Keuangan		0.700
KLK1	0.861	
KLK2	0.867	
KLK3	0.808	
KLK4	0.809	

<i>Good Government Governance</i>	0.716
GGG1	0.805
GGG2	0.875
GGG3	0.889
GGG4	0.811

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil uji validitas variabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi syarat  $>0,6$  atau  $>0,7$  dan nilai AVE sudah diatas  $>0,5$ .

## 2. Validitas Diskriminan (*Outer Model*)

Batasan nilai AVE yang disarankan dalam sebuah penelitian eksploratori adalah lebih besar dari 0.5. Sedangkan untuk melihat validitas diskriminan, harus memuat prinsip bahwa *manifest variabel* yang berbeda harusnya tidak berkorelasi tinggi. Untuk melihat validitas diskriminan dapat melihat *cross loading* setiap variabel harus lebih dari 0.70. Selain cara tersebut dapat juga menggunakan rumus perbandingan akar kuadrat AVE dengan nilai korelasi antar konstruk dalam sebuah model. Tabel 4.5 menjelaskan mengenai validitas diskriminan.

**Tabel 4.5**  
**Uji Validitas Diskriminan**

	GGG	KLK	KSDM	SIA	SPI
GGG	<b>0.846</b>				
KLK	0.514	<b>0.837</b>			
KSDM	0.567	0.672	<b>0.828</b>		
SIA	0.589	0.662	0.606	<b>0.830</b>	
SPI	0.587	0.599	0.524	0.525	<b>0.802</b>

Sumber: Data diolah, 2023

Pada tabel 4.5 dijelaskan bahwa angka yang berada didalam tabel yang bercetak tebal merupakan hasil dari akar AVE, jika dibandingkan dengan korelasi antar konstruk maka nilai akar AVE lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk. Dapat disimpulkan hasil uji validitas diskriminan pada tabel 4.5

menunjukkan bahwa semua konstruk telah memenuhi syarat, maka dapat diartikan variabel telah memenuhi uji validitas diskriminan.

### 3. Uji Reliabilitas (*Outer Model*)

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Uji Reliabilitas**

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
GGG	0.868	0.880	0.909	0.716
KLK	0.857	0.859	0.903	0.700
KSDM	0.883	0.887	0.915	0.685
SIA	0.943	0.950	0.952	0.689
SPI	0.861	0.863	0.900	0.643

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa semua variabel telah memenuhi nilai  $>0.7$  baik dari *composite reliability* dan *cronbach alpha*. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa pengukur yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji reliabilitas.

#### 4.2.3 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural atau *inner model* menggunakan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada *substansive theory*. R-Square digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen, apakah mempunyai pengaruh substansive (Ghozali, 2014).



Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan *SmartPLS 3*, diperoleh nilai R-Square sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Nilai R-Square**

	R Square	R Square Adjusted
GGG	0.484	0.459
KLK	0.595	0.569

Sumber: Data diolah, 2023

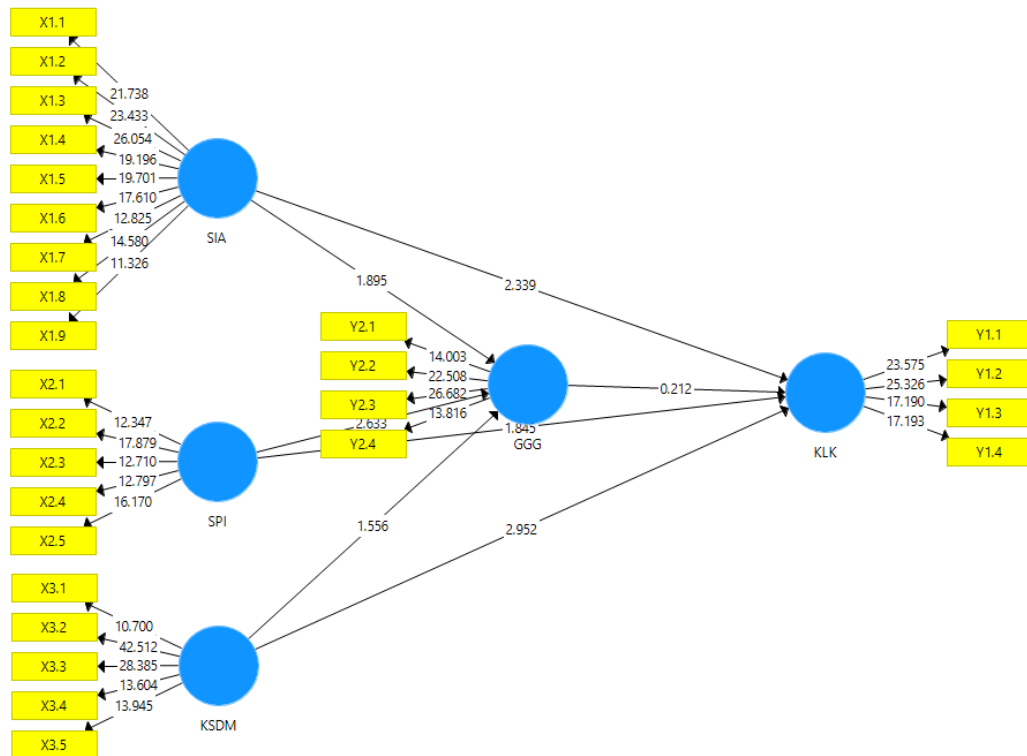
Nilai *R-Square* pengaruh secara bersama-sama atau simultan X dan Z terhadap Y adalah sebesar 0.595 dengan nilai *adjusted r square* 0.569. Maka, dapat dijelaskan bahwa semua konstruk exogen X dan Z secara serentak mempengaruhi Y sebesar 0.569 atau 56.9%. Nilai *R-Square* pengaruh secara bersama-sama atau simultan X, Y dan terhadap Z adalah sebesar 0.484 dengan nilai *adjusted r square* 0.459. Maka dapat dijelaskan bahwa semua konstruk exogen X dan Y secara serentak mempengaruhi Z sebesar 0.459 atau 45.9%.

#### 4.2.4 Uji Hipotesis

Untuk melihat apakah suatu hipotesis itu dapat diterima atau ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, T-statistik, dan P-values. Pada penelitian ini dilakukan uji T untuk menguji pengaruh antar variabel. Uji T dilakukan dengan membandingkan T-statistik dengan T-tabel. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan bantuan software *SmartPLS (Partial Least Square) 3*. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil *bootstrapping*.

*Rules of thumb* yang digunakan pada penelitian ini adalah T-statistik  $>1,96$  dengan tingkat signifikansi P-value 0,05 (5%) dan koefisien beta bernilai positif.

**Gambar 4. 2**  
**Output Bootstrapping**



Sumber: Data diolah, 2023

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi & kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal & *good government governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap *good government governance*, sistem informasi akuntansi & kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap *good government governance*.

**Tabel 4.8**  
**Uji Hipotesis**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
GGG -> KLK	-0.035	-0.051	0.168	0.207	0.836
KSDM -> GGG	0.229	0.235	0.143	1.601	0.110
KSDM -> KLK	0.354	0.356	0.121	2.930	0.004
SIA_ -> GGG	0.283	0.284	0.153	1.846	0.065
SIA_ -> KLK	0.332	0.353	0.138	2.408	0.016
SPI -> GGG	0.318	0.318	0.122	2.613	0.009
SPI -> KLK	0.260	0.259	0.137	1.892	0.059

Sumber: Data diolah, 2023

Pengaruh dari Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (KLK) positif ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.332 dengan nilai statistik sebesar 2.408 ( $2.408 > 1.96$ ). Hasil tersebut menunjukkan hipotesis (H1)  $T\text{-statistik} > T\text{-tabel}$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dimana  $T\text{-tabel}$  senilai 1.96 dan signifikan  $P\text{-value} < 0.05$  ( $0.016 < 0.05$ ). Sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya (H1) yaitu Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (KLK) ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.260 dengan nilai statistik sebesar 1.892 dan  $P\text{-value}$  0.052. Sehingga dari penjelasan tersebut Sistem Pengendalian Internal memiliki arah positif dengan hipotesis dua (H2) yaitu Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh dari Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (KLK) positif ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.354 dengan nilai statistik sebesar 2.930. Hasil tersebut menunjukkan

hipotesis (H3)  $T\text{-statistik} > T\text{-tabel}$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dimana  $T\text{-tabel}$  senilai 1.96 dan signifikan  $P\text{-value}$  0.004. Sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya (H3) yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh dari Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap *Good Government Governance (GGG)* ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.283 dengan nilai statistik sebesar 1.846 ( $1.846 < 1.96$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis (H4)  $T\text{-statistik} < T\text{-tabel}$  sehingga  $T\text{-tabel}$  senilai 1.96 dan signifikan  $P\text{-value} < 0.05$  ( $0.065 > 0.05$ ). Sehingga hipotesis empat (H4) ditolak yaitu Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh terhadap *Good Government Governance*.

Pengaruh dari Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap *Good Government Governance (GGG)* positif ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.318 dengan nilai statistik sebesar 2.613 ( $2.613 > 1.96$ ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis lima (H5) dengan  $T\text{-statistik} > T\text{-tabel}$  sehingga  $T\text{-tabel}$  senilai 1.96 dan signifikan pada  $P\text{-value} < 0.05$  ( $0.009 < 0.05$ ) maka hipotesis tujuh (H5) yaitu Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap *Good Government Governance*.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) terhadap *Good Government Governance (GGG)* ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.229 dengan nilai statistik sebesar 1.601 dan  $P\text{-value}$  0.110. Sehingga dari penjelasan tersebut Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki arah positif dengan hipotesis enam

(H6) yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap *Good Government Governance*.

Pengaruh dari *Good Government Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan positif ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar -0.035 dengan nilai statistik sebesar 0.207 ( $0.207 < 1.96$ ) dan *P-Value* 0.836. Sehingga dari penjelasan tersebut *Good Government Governance* memiliki arah negatif dengan hipotesis tujuh (H7) yaitu *Good Government Governance* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

**Tabel 4.9**  
**Direct Effect**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
SIA_ -> KLK	0.332	0.353	0.138	2.408	0.016
SPI -> KLK	0.260	0.259	0.137	1.892	0.059
KSDM -> KLK	0.354	0.356	0.121	2.930	0.004

Sumber: Data diolah, 2023

**Tabel 4.10**  
**Inderrect Effect**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
KSDM -> GGG -> KLK	-0.008	-0.012	0.046	0.174	0.862
SIA_ -> GGG -> KLK	-0.010	-0.021	0.057	0.172	0.863
SPI -> GGG -> KLK	-0.011	-0.014	0.055	0.203	0.839

Sumber: Data diolah, 2023

Persyaratan efek mediasi harus dipenuhi ketika: jika nilai pada T-statistik tahap pertama dan tahap kedua meningkat dan tetap signifikan maka tidak ada mediasi, jika nilai pada T-statistik tahap pertama dan tahap kedua mengalami penurunan dan tidak signifikan maka *full mediation*, jika nilai T-statistik tahap pertama dan tahap kedua turun dan tetap signifikan maka *partial mediation*. Berdasarkan tabel hasil pengujian dari *specific indirect effect* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan melalui *good government governance*

Pengaruh tidak langsung sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan melalui variabel *good government governance*. Dilihat nilai T-statistik tahap pertama sebesar 2.408 dan tahap kedua sebesar 0.172 yang artinya mengalami penurunan dan tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa *good government governance full mediation* pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan melalui *good government governance*

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan variabel *good government governance*. Nilai Tstatistik tahap pertama sebesar 1.892 dan tahap kedua sebesar 0.203 yang artinya mengalami penurunan dan tidak signifikan. Tetapi karena asumsi awal uji mediasi adalah pengujian *direct effect* harus terdukung maka dapat disimpulkan bahwa *good government*

*governance* tidak memediasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Variabel kompetensi sumber daya manusia Terhadap kualitas laporan keuangan melalui *good government governance*

Pengaruh tidak langsung kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan melalui variabel *good government governance*. Nilai T-statistik tahap pertama sebesar 2.930 dan tahap kedua sebesar 0.174 yang artinya mengalami penurunan dan tidak signifikan. Berdasarkan penjabaran di atas variabel *good government governance full mediation* pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

### **4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data**

#### **4.3.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Variabel sistem informasi akuntansi memiliki nilai T-statistik dan signifikansi sebesar 2.408 dan 0,016. Maka, nilai signifikansi variable Sistem informasi akuntansi lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai T-statistik lebih besar dari T-tabel yaitu  $2.408 > 1,96$ . Hasil penelitian juga menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.332. Hal ini menandakan bahwa variable sistem informasi akuntansi (X1) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Sehingga hipotesis pertama (H1) terdukung.

Pada penelitian ini sistem informasi akuntansi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data kuesioner bahwa nilai presentase dari variabel sistem informasi akuntansi sebesar 78% pada kualitas

laporan keuangan dengan nilai presentase 80% yang artinya kualitas laporan keuangan diatas rata-rata, dapat dikatakan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi sudah diterapkan sesuai SAP dan dilakukan secara periodik untuk membuat kualitas laporan keuangan, sehingga dari hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada SKPD Kabupaten Sragen.

Pengklasifikasian data keuangan menjadi salah satu indikator penting yang dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan lebih mudah dan cepat oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Kualitas input, proses, dan output yang baik, maka laporan keuangan yang diinginkan akan memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan. Penerapan sistem informasi akuntansi terdapat keterkaitan dengan teori kepatuhan dimana penggunaan pegawai yang menggunakan sistem informasi akuntansi harus mematuhi peraturan yang ada untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penggunaan sistem tersebut (Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ridzal, Sujana, & Malik (2022) menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi sudah digunakan secara optimal seperti penggunaan komputer, software / perangkat lunak dan lainnya yang sejenis. Penggunaan secara optimal dalam Pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Tawaqal & Suparno, (2017) juga menjelaskan penerapan sistem informasi akuntansi dalam suatu instansi pemerintahan sangat berpengaruh, maka dapat dibayangkan bagaimana jadinya apabila suatu instansi pemerintahan tidak dapat memproses transaksinya secara jelas dan teliti.



Sonia, (2016) dalam hasil penelitiannya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Dimana dapat dijelaskan bahwa dengan memanfaatkan teknologi yang benar maka dapat membantu dan menghasilkan laporan keuangan yang handal.

#### **4.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai T-statistik dan signifikansi sebesar 1.892 dan 0.059. Maka, nilai signifikansi variabel sistem pengendalian internal lebih besar dari 0.05. Selain itu, nilai T-statistik lebih kecil dari T-tabel yaitu  $1.894 < 1.96$ . Hasil penelitian juga memperlihatkan nilai koefisien jalur sebesar 0,260. Hal ini menandakan bahwa variable sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak.

Pada penelitian ini sistem pengendalian internal tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Analisis ini dapat dibuktikan dengan data kuesioner bahwa nilai persentase dari variabel sistem pengendalian internal sebesar 87,5% pada kualitas laporan keuangan dengan nilai persentase 85% yang artinya kualitas laporan keuangan dibawah rata-rata, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi penerapan sistem pengendalian internal dengan adanya pemisahan wewenang secara tepat dalam melakukan kegiatan belum bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Sragen.

Sistem pengendalian internal yang lemah belum memastikan keandalan laporan keuangan dan mencegah terjadinya kecurangan atau ketidakakuratan data

akuntansi. Tetapi Teori kepatuhan mendukung keterkaitan sistem pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan dimana pengendalian internal dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan harus diungkapkan secara wajar berdasarkan akuntansi di Indonesia, kepatuhan terhadap undang-undang yang ada, dan peraturan serta peningkatan dalam kegiatan operasional secara efektif dan efisien (Sumaryati, Novitasari, & Machmudah 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020) menunjukkan hasil meskipun sistem pengendalian intern di OPD belum terlaksana dengan baik, namun kualitas LK di lingkungan pemerintah daerah Grobogan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK yang artinya LK di lingkungan Pemkab Grobogan sudah berkualitas baik.

Sabatiah & Bustami, (2020) memberikan hasil bahwa sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya faktor pendukung lain dalam sistem pengendalian intern yang mendorong meningkatnya kualitas laporan keuangan. Besar kecilnya sistem pengendalian intern dalam kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh.

Mokoginta, Lambey, (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang diterapkan sudah baik, namun belum dijalankan secara efektif dan efisien sehingga menyebabkan kurangnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

### **4.3.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai T-statistik dan signifikansi sebesar 2.930 dan 0,004. Maka, nilai signifikansi variable kompetensi sumber daya manusia lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai T-statistik lebih besar dari T-tabel yaitu  $3.043 > 1,96$ . Hasil penelitian juga menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.354. Hal ini menandakan bahwa variable kompetensi sumber daya manusia (X3) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Sehingga hipotesis ketiga (H3) terdukung.

Pada penelitian ini kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data kuesioner bahwa nilai presentase dari variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 80% pada kualitas laporan keuangan dengan nilai presentase 85% yang artinya kualitas laporan keuangan diatas rata-rata, dapat dikatakan bahwa meningkatnya kompetensi sumber daya manusia akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi dalam SAP serta memahami struktur organisasi pada instansi atau dinas tempat kerja, maka dapat memberikan kualitas laporan keuangan yang handal dan relevan.

Teori keagenan mendorong keterkaitan sumber daya manusia dan kualitas kualitas laporan keuangan pemerintah, dimana masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas di semua organisasi pemerintah agar tercapai kebutuhan masyarakat (prinsipal) dan memberikan akuntabilitas, penyajian, pelaporan dan pengungkapan aktivitas

tanggung jawabnya pada masyarakat, akan memberikan kualitas laporan keuangan pemerintah yang handal (Sumaryati, Novitasari, & Machmudah 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumaryati, Novitasari, & Machmudah (2020) dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil yang baik harus melatih kompetensi atau kemampuan dan menambah wawasan dibidang akuntansi baik secara teori maupun praktek maupun secara manual atau terkomputerisasi.

Gasperz, (2019) memberikan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di wilayah maluku. Dimana peningkatan kompetensi sumber daya manusia dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan bagi para penata laporan keuangan.

Sundari & Rahayu, (2019) menunjukkan hasil bahwa kompetensi pegawai pada SKPD Kota Bandung dapat memiliki kompetensi yang memadai untuk menyusun laporan keuangan dan memahami tanggungjawab serta menyelesaikan tugas, hal tersebut dapat membantu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

#### **4.3.4 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap *Good Government Governance***

Variabel Sistem informasi akuntansi memiliki nilai T-statistik dan signifikansi sebesar 1.846 dan 0,065. Maka, nilai signifikansi variable sistem informasi akuntansi lebih besar dari 0,05. Selain itu, nilai T-statistik lebih kecil dari T-tabel yaitu  $1.821 > 1,96$ . Hasil penelitian juga menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.283. Hal ini menandakan bahwa variable Sistem informasi akuntansi (X4)

tidak berpengaruh terhadap *good government governance* (Y). Sehingga hipotesis ke-empat (H4) ditolak.

Pada penelitian ini sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap *good government governance*. Analisis ini dapat dibuktikan dengan data kuesioner bahwa nilai persentase dari variabel sistem informasi akuntansi sebesar 78% pada *good government governance* dengan nilai persentase 70% yang artinya *good government governance* dibawah rata-rata, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi penerapan sistem informasi akuntansi dengan melakukan pengklasifikasian serta pengelompokan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan belum dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik pada SKPD Kabupaten Sragen.

Pada penelitian sebelumnya, sistem informasi akuntansi salah satu factor yang dapat mewujudkan *Good Government Governance*. Hal ini diperlukan adanya penerapan yang baik terhadap sistem informasi akuntansi, maka *ouput* yang dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan akan semakin bagus juga pada tata kelola pemerintahan yang baik (Wulan Dary, 2020). Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan penggunaan sistem informasi pada *good government governance* dimana dalam penerapan sistem ini pegawai harus mengikuti aturan agar tidak muncul pelanggaran penggunaan sistem informasi akuntansi dengan begitu akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Azzindani & M. Irwan, (2020) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa sistem informasi tidak berpengaruh terhadap *Good Government Governance*. Dimana hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pemahaman para pengelola keuangan, kurangnya sarana dan

prasarana pendukung dalam pelaksanaan implementasi SIMDA, serta faktor peralatan (*tools*).

#### **4.3.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap *Good Government Governance***

Variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai T-statistik dan signifikansi sebesar 2.613 dan 0,009. Maka, nilai signifikansi variable sistem pengendalian internal lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai T-statistik lebih besar dari T-tabel yaitu  $2.531 > 1,96$ . Hasil penelitian juga menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.318. Hal ini menandakan bahwa variable ko sistem pengendalian internal (X5) berpengaruh positif terhadap *good government governance* (Y). Sehingga hipotesis kelima (H5) terdukung.

Pada penelitian ini sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap *good government governance*. Hal ini dapat dibuktikan dengan data kuesioner bahwa nilai presentase dari variabel sistem pengendalian internal sebesar 82% pada *good government governance* dengan nilai presentase 90% yang artinya *good government governance* diatas rata-rata, dapat dikatakan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal dengan memiliki otorisasi yang memadai dalam setiap kegiatan operasional yang ada dalam siklus persediaan pada SKPD Kabupaten Sragen juga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sistem pengendalian internal adalah sistem yang dioperasikan di semua lingkup organisasi daerah dengan tercapai tujuan akan tata kelola pemerintahan yang baik (Nurdin, Tahar, & Nurbayani 2019). Teori kepatuhan menjelaskan hubungan antara sistem pengendalian internal dengan *good government*

*governance* pada pemerintah daerah dimana pengendalian internal membantu rancangan sistem akuntansi dalam konteks penggunaannya pada masing-masing organisasi untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik Yusniyar, Darwanis, & Abdullah (2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Safrin & Pratiwi, (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa BPKAD mampu memberikan pengawasan pada pemerintah daerah dengan memberikan tata pelayanan yang sesuai dengan harapan pemerintah. Sehingga dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik mampu mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Nurdin, Tahar, & Nurbayani (2019) menjelaskan SPIP dapat membantu entitas mencapai efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas. Lebih lanjut, hal ini semakin mempertegas fakta empiris bahwa dalam penugasan auditor BPKP Sulawesi Selatan, mereka telah mendapatkan fakta atas pencapaian efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi entitas pemerintah yang telah menerapkan SPIP di daerah kerja mereka.

Yusniyar, Darwanis, & Abdullah (2016) dalam penelitiannya sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *good government governance*. Maka dapat disimpulkan semakin tinggi pengendalian intern yang dilakukan pada setiap SKPA di Pemerintah Aceh, maka semakin tinggi pula terciptanya prinsip-prinsip *good governance*.

#### **4.3.6 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap *Good Government Governance***

Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai T-statistik dan signifikansi sebesar 1.601 dan 0,110. Maka, nilai signifikansi variable kompetensi sumber daya manusia lebih besar dari 0,05. Selain itu, nilai T-statistik lebih kecil dari T-tabel yaitu  $1.587 > 1,96$ . Hasil penelitian juga menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.229. Hal ini menandakan bahwa variable kompetensi sumber daya manusia (X6) tidak berpengaruh terhadap *good government governance* (Y). Sehingga hipotesis ke-enam (H6) ditolak.

Pada penelitian ini kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap *good government governance*. Analisis ini dapat dibuktikan dengan data kuesioner bahwa nilai persentase dari variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 85% pada *good government governance* dengan nilai persentase 72% yang artinya *good government governance* dibawah rata-rata, dapat dikatakan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas yang diselesaikan secara tepat waktu dan efektif serta mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan pegawai belum dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik pada SKPD Kabupaten Sragen.

Teori agensi mendukung hubungan kualitas kompetensi sumber daya manusia dan *good government governance*. Teori keagenan menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen yang diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas di semua instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (prinsipal) dan memberikan



akuntabilitas, integritas dan transparansi kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat, seperti menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik akan kinerja pada instansi tersebut (Azzindani & M. Irwan, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Azzindani & M. Irwan, (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kinerja pemerintah dapat berpengaruh terhadap *good government governance*. Maka untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para pengelola keuangan, pemerintah daerah terus mendorong para pengelola keuangan selaku aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman akuntansi serta terus mendapatkan beberapa pelatihan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan agar dapat meningkatkan kinerjanya guna menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

#### **4.3.7 Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Variabel *good government governance* memiliki nilai T-statistik dan signifikansi sebesar 0.207 dan 0,836. Maka, nilai signifikansi variable *good government governance* lebih besar dari 0,05. Selain itu, nilai T-statistik lebih kecil dari T-tabel yaitu  $0.209 > 1,96$ . Hasil penelitian juga menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0.035. Hal ini menandakan bahwa variable *good government governance* (X7) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Sehingga hipotesis ketujuh (H7) ditolak.

Penelitian ini menghasilkan *good government governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil itu menunjukkan dari OPD

di Kabupaten Sragen walaupun belum melaksanakan *good government governance* pada proses pemerintahan dengan baik sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya tetap tidak mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan (Tullah, Apriyanti, & Wijaya, 2018).

Pada penelitian ini menjelaskan bahwa *good government governance* pada OPD di kabupaten sragen akan proses pemerintahan yang baik sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Terkaitnya *good government governance* akan kualitas laporan keuangan pemerintah merujuk akan teori agensi, adanya *good government governance* pada pemerintah yang bertindak menjadi agent dapat kewenangan dari principal diharapkan bisa menjalankan pengelolaan pemerintahan yang baik dan terbuka oleh publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi meningkat (Azzindani & M. Irwan, 2020).

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Cahaya Putra & Romli, (2022) yang mendapatkan hasil *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana mewujudkan kualitas laporan keuangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sehingga akan menghasilkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Philadelphiah, Suryaningsum, & Sriyono (2020) memberikan hasil bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa OPD di Kabupaten Klaten telah melaksanakan *good*

*governance* pada proses pemerintahan dengan baik sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Tullah, Apriyanti, & Wijaya (2018) yang menunjukkan hasil bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dimana integritas yang terkait dengan budaya kerja, kode etik dalam proses pengadaan barang, serta aturan hukum yang berlaku untuk keterbukaan yang didalamnya berkaitan dengan memberikan informasi keuangan kepada masyarakat telah memadai.

#### **4.3.8 *Good Government Governance* Memediasi Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Government Governance* dapat memediasi pengaruh antara sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil olah data dimana nilai T-statisik tahap pertama sebesar 2.408 dan tahap kedua sebesar 0.172. Nilai tersebut mengalami penurunan dan tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Good Government Governance* memediasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga hipotesis delapan (H8) diterima.

Pada penelitian ini dalam pendekatan *good goverment governance*, untuk menunjukkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, maka sistem tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi karakteristik kualitas informasi Azzindani & M. Irwan, (2020). Maka unsur dari karakteristik kualitas laporan keuangan seperti relevan dan reliabel harus terpenuhi dalam suatu laporan keuangan, sehingga

laporan keuangan yang disajikan diyakini berkualitas dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pada penelitian ini untuk dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, maka sistem tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi karakteristik kualitas informasi. Teori kepatuhan mengargumentasikan bahwa unsur dari karakteristik kualitas laporan keuangan seperti relevan dan reliabel harus terpenuhi dalam SAP, sehingga laporan keuangan yang disajikan diyakini berkualitas dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Azzindani & M. Irwan, 2020).

Peran *good government governance* memediasi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan juga dapat dikaitkan dengan teori keagenan yang digambarkan melalui hubungan antara pengelola keuangan dengan atasannya, baik bendahara pengeluaran maupun staf subbagian keuangan dan akuntansi pada OPD Pemerintah Kabupaten Sragen untuk melakukan tugas pengelolaan keuangan (Sumaryati, Novitasari, & Machmudah, 2020).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Azzindani & M. Irwan, (2020) yang mendapatkan hasil *good government governance* tidak memediasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Namun dalam teori keagenan yang digambarkan melalui hubungan antara pengelola keuangan yang diangkat atau dipilih oleh atasannya bertanggung jawab untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka akuntabilitas publik guna mewujudkan *good government governance*.

#### **4.3.9 *Good Government Governance* Memediasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Government Governance* dapat memediasi pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil olah data dimana nilai T-statisik tahap pertama sebesar 1.892 dan tahap kedua sebesar 0.203. Nilai tersebut mengalami penurunan dan tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Good Government Governance* tidak memediasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga hipotesis sembilan (H9) ditolak.

Pencapaian *good government governance* belum dapat digunakan sistem pengendalian internal yang akan menunjukkan seberapa besar kualitas informasi keuangan operasional dan manajerial pada suatu organisasi (Safrin & Pratiwi, 2021). Untuk mencapai tujuan yang luas, dimana pengendalian internal bukan merupakan pondasi *good government governance* yang dapat membantu memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan efektif akan laporan keuangan tersebut.

Pada hasil tersebut *good government governance* tidak dapat memediasi antara sistem pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan. Namun teori kepatuhan mendukung *good government governance* antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan daerah, dimana pengendalian intern dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa LKPD harus diungkapkan secara wajar berdasarkan SAP yang berlaku serta kepatuhan terhadap undang-undang

yang ada, dan peraturan serta peningkatan dalam kegiatan operasional secara efektif dan efisien dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, agar menghasilkan kualitas laporan keuangan relevan dan andal (Sumaryati, Novitasari, & Machmudah, 2020).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Amijaya, (2019) serta Safrin & Pratiwi, (2021) yang mendapatkan hasil *good government governance* memediasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dapat dijelaskan untuk mewujudkan sistem pengendalian internal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pada OPD pemerintah kabupaten sragen memerlukan prasyarat berupa *good government governance* yang baik dan bersih sehingga akan menghasilkan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan tersebut.

#### **4.3.10 *Good Government Governance* Memediasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Government Governance* dapat memediasi pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil olah data dimana nilai T-statisik tahap pertama sebesar 2.930 dan tahap kedua sebesar 0.174. Nilai tersebut mengalami penurunan dan tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Good Government Governance* memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga hipotesis sepuluh (H10) diterima.

Pada penelitian ini *good government governance* memediasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Maka kompetensi sumber daya manusia yang baik dalam hal keahlian dan pengalaman juga memerlukan *good government governance* dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil dimana harus melatih kompetensi atau kemampuan dan menambah wawasan dibidang akuntansi sehingga menciptakan kualitas laporan keuangan yang berkualitas (Azzindani & M. Irwan, 2020).

*Good government governance* pada prinsipnya bertujuan untuk terbentuknya keterbukaan informasi, perlakuan adil dalam melaksanakan kewajiban serta menerima hak terhadap semua aparatur pemerintah daerah. Hal ini diperlukannya pemahaman serta pengalaman pada pemerintah yang bertugas, teori agensi mengargumentasikan yaitu pegawai pemerintah kabupaten sragen sebagai agen yang harus melaksanakan kontrak berupa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh prinsipal yaitu pejabat yang berwenang membuat peraturan dalam sektor publik akan tata kelola pemerintahan yang baik agar terciptanya kualitas laporan keuangan (Azzindani & M. Irwan, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Azzindani & M. Irwan, (2020) yang mendapatkan hasil *good government governance* memediasi pengaruh kinerja aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dapat dijelaskan dengan terwujudnya *good government governance* pada pemerintah daerah, akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang kompeten pada pemerintah daerah untuk menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan sebagai bentuk

tanggungjawabnya kepada masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dimediasi *good government governance* pada kabupaten sragen. Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah di kabupaten sragen sudah baik dan berkualitas sehingga laporan keuangannya memperoleh opini WTP dari BPK.
2. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dari rendahnya tingkat memanfaatkan sistem pengendalian internal yang baik tidak mempengaruhi hasil opini BPK akan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Sragen.
3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam penyusunan kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari seberapa besar pengetahuan, keahlian, dan perilakunya akan menyusun laporan keuangan tersebut.
4. Sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap *good government governance*. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun penerapan sistem

informasi akuntansi pada suatu instansi sudah dilakukan dengan baik ternyata tidak mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik pada satuan kerja perangkat daerah sragen.

5. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *good government governance*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di pemerintah sangat berguna agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencapai berbagai tujuan yang luas di sebuah instansi.
6. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap *good government governance*. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya kompetensi tersebut belum mampu mencapai tata kelola pemerintahan berintegritas, akuntabilitas serta transparansi akan tujuan yang luas dalam instansi tersebut.
7. *Good government governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa OPD di Kabupaten Sragen walaupun belum melaksanakan *good government governance* pada proses pemerintahan dengan baik sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya tetap tidak mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan.
8. *Good government governance* memediasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Maka sistem tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi karakteristik kualitas informasi agar menyusun laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas.

9. *Good government governance* tidak memediasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk mencapai tujuan yang luas, dimana pengendalian internal bukan merupakan pondasi *good government governance* yang dapat membantu memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan efektif akan laporan keuangan tersebut.
10. *Good government governance* memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. kompetensi sumber daya manusia yang baik dalam hal keahlian dan pengalaman juga memerlukan *good government governance* dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil dimana harus melatih kompetensi atau kemampuan dan menambah wawasan dibidang akuntansi sehingga menciptakan kualitas laporan keuangan yang berkualitas.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian ini memiliki keterbatasan pada hal-hal berikut:

1. Objek penelitian ini relatif sedikit, yaitu hanya mengambil 25 SKPD pada Kabupaten Sragen.
2. Data penelitian yang diperoleh atas persepsi jawaban responden melalui kuesioner bersifat subjektif dan tertutup, hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepercayaan dan persepsi individu.

### 5.3 Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan hasil penelitian yang lebih akurat, maka perlu dilakukannya meningkatkan metodologi yang akan digunakan khususnya pada wawancara langsung terhadap responden, sehingga akan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, dengan sampel perolehan di kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah dengan begitu hasilnya dapat digeneralisasi.
3. Penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan metode SEM-Pls. Diharapkan, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengujian *moderating* dengan metode *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aguswen, Ridha, A., & Astuti, I. N. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan , Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah ( SUPM ) Ladong Kabupaten Aceh Besar. *SIMEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES*, 11(2), 1–8.
- Amijaya, H. T. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Good Government Governance Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Computech & Bisnis*, 13(2), 70–80.
- Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6, 977–989.
- Azzindani, R., & M. Irwan. (2020). Implementasi SIMDA dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Good Government Governance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 31–54.
- Budiawan, D. A., & Purnomo, B. S. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat) Desiana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 276–288.
- Cahaya Putra, V. D., & Romli, R. (2022). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Good Government Governance terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(1), 46–65.
- Chandarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Darmawan, A., & Darwanis. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumberdaya Manusia Dan Penerapan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(1), 9–19.
- Daud, & Windana. (2014). Annual Report 2020 PT. Mulia Boga Raya Tbk. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 12(1) 17-28.

- Dhiyavani, S. I. (2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance. *JOM Fekon*, 4(1), 1859–1872.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Jurnal Riset Manajemen Bisnis & Publik*. 1(2), 2-23.
- Efendi, N. (2019). Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 31(1), 1–10.
- Gasperz, J. J. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 5(2), 75–83.
- Ghozali. (2014). *Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Ghozali. (2018). *Analisis Partial Least Square 3.2.8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Ghozali, I. dan H. L. (2015). *Partial Least Square Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Untuk Penelitian Empiris. Semarang: Undip.
- Hasanah, S., & Siregar, T. R. S. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu Pendahuluan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 9(1), 38-47.
- Husna, & Nurul, T. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal dan Peran Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal JOM Fekom*, 4(1), 2835–2849.
- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Politeknik Pos Indonesia*, 12(2), 201–214.

- Kartika, & Amalia. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi Pada Pemerintah Kota Magelang. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*. 3(2), 1-22.
- Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi* (Edisi 3). Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mansur, F., Prasetyo, E., & Maiyarni, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 2(2), 143–152.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Merlyn C. T. Kalumata, Ventje Ilat, J. D. L. W. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Accountability*, 17, 152–167.
- Modo, S. M., Saerang, D. P. E., & Poputra, A. T. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 1, 14–30.
- Mokoginta, Lambey, & W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Novtania. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874–890.
- Nurdin, Y., Tahar, F., & Nurbayani, N. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian Good Government Governance Melalui Pencegahan dan Pengungkapan Fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(2), 116.
- Oktariana, Raharjo, & Andini. (2016). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan di kota semarang. *Journal Of Accounting*, 2(2) 23-47.
- Philadelphina, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono. (2020). The Effect Of Human Resources Competency, Government Accounting Standards, Good Governance, And Internal Control Systems On The Quality Of Local Government Financial Statements. *J-ISCAN: Journal Of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35.
- Pilander, S. M., Paul, D., Saerang, E., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh Penerapan

- Standar Akuntansi Pemerintahan , Sistem Pengendalian Intern , Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu Pendahuluan Salah satu bentuk pertanggung. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1, 128–139.
- Pratiwi, A., Agusiady, R., & Saepudin, D. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal , Audit Internal , Audit Eksternal Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Good Government Governance : Studi Kasus Pada OPD Pemerintahan Daer. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(3), 1(2) 277–289.
- Pratiwi, F., Purba, S., & Nainggolan, A. (2020). Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Bpkpad Kabupaten Nias Barat). *Jurnal Mutiara AKuntansi*, 5(1), 1–10.
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 3094–3104.
- Rusvianto, D., Mulyani, S., & Yuliafitri, I. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah ( Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung ). *Jurnal BanqueSyar'i*, 6(2) 3–67.
- Sabatiah, L., & Bustami, H. E. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Di Bakeuda Kota Sungai Penuh. *Jurnal Adminsitrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, 2(1), 121–136.
- Safrin, M., & Pratiwi, E. T. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Good Government Governance Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada BPKAD Kabupaten Buton Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3(2), 14–34.
- Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Skpd Se Kota Medan. *Jurnal Lincoln Arsyad*, 3(2), 1–46.
- Setyowati, L., Isthika, W., Pratiwi, R. D., & Nuswantoro, U. D. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan. *Kinerja Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 1, 179–192.
- Shintia, & Erawati. (2017). Pengaruh Kualitas Sdm, Sistem Informasi, Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21, 1186–1205.



- Sonia, D. P. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*, 3(1), 87–100.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sumaryati, Novitasari, & Machmuddah. (2020). Accounting Information System, Internal Control System, Human Resource Competency and Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 795–802.
- Sundari, H., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018 ). *E-Proceeding of Management*, 6(1), 660–667.
- Susanto, A. (2004). *Sistem Informasi Akuntansi Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer* . Bandung: Penerbit Linggay Jaya.
- Tawaqal, I., & Suparno. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 02(04), 125–135.
- Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Wijaya, N. (2018). Pengaruh Penerapan Good Government Governance (Ggg) Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Di Jawa Barat dan Banten). *Balance Vocation Accounting Journal*, 2(1), 1–11.
- Wulan Dary, N. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Good Government Governance. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 35-58.
- Yusniyar, Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Skpa Pemerintah Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(2), 100–115.

# LAMPIRAN



No	Bulan	Maret			
	Kegiatan	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal				
2	Konsultasi				
3	Revisi Proposal				
4	Seminar Proposal				
5	Pengumpulan Data				
6	Analisis Data				
7	Penulisan Akhir Naskah Skripsi				
8	Pendaftaran Munaqasah				
9	Munaqasah	X			
10	Revisi Munaqasah		X	X	

Lampiran 2  
Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Sukowati No. 255, Telp. (0271) 891025, Hunting (8 Saluran)  
Website <http://www.sragenkab.go.id> dan email: [info@sragenkab.go.id](mailto:info@sragenkab.go.id)  
SRAGEN 57211

Sragen, 18 Februari 2022

Nomor : 070/212/029/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : **Pemberitahuan**

Kepada:  
Yth. 1. Staf Ahli Bupati  
2. Asisten Sekda  
3. Sekretaris DPRD  
4. Inspektur  
5. Kepala Dinas/Badan  
6. Direktur RSUD  
7. Kepala Bagian Setda  
8. Camat  
9. Pimpinan BUMD  
10. Kepala Desa/Lurah  
11. Kepala Puskesmas  
12. Kepala PAUD/TK/SD/SMP  
di -

**SRAGEN**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Sragen, diberitahukan bahwa:

1. Setiap orang yang akan melakukan penelitian di Kabupaten Sragen harus memiliki **Surat Keterangan Penelitian (SKP)**, setiap perguruan tinggi yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata harus memiliki **Izin KKN**, serta setiap perguruan tinggi, sekolah, atau lembaga nirlaba yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan harus memiliki **Izin PKL**;
2. Khusus untuk SKP sebagaimana tersebut pada poin (1) **dikecualikan terhadap**:
  - a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan
  - b. penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Kewenangan penerbitan SKP, Izin KKN, dan Izin PKL **mulai 21 Februari 2022 beralih ke Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**;
4. Pengajuan permohonan dan pencetakan SKP, Izin KKN, dan Izin PKL **secara mandiri** dapat dilakukan secara *online* melalui alamat <http://izinpenelitian.sragenkab.go.id/> dengan mengunggah seluruh persyaratan;
5. Aturan lebih rinci dapat dibaca pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Sragen sebagaimana terlampir.

Demikian surat edaran kami, untuk dapat dipedomani.

a.n. BUPATI SRAGEN  
Sekretaris Daerah



**Drs. TATAG PRABAWANTO B., M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19621028 199203 1 004

- Tembusan, kepada Yth.:
1. Bupati Sragen sebagai laporan,
  2. Arsip.

"Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE-BSSN"



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Sukowati No. 255 Sragen, Telp. (0271) 892348, Fax. (0271) 894433  
Website <http://dpmptsp.sragenkab.go.id> dan E-mail: [dpmptsp@sragenkab.go.id](mailto:dpmptsp@sragenkab.go.id)  
SRAGEN - 57211

---

**Resi Permohonan Surat Keterangan Penelitian**

Telah diterima pengajuan permohonan Surat Keterangan Penelitian dari :

Nama : Yusuf Hidayat  
Alamat : Suwatu 005/000, Suwatu, Tanon, Sragen, No. 0, RT. 5/0, Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah  
Nomor Ponsel : 085800656458  
Tanggal Terdaftar : 2023-01-09 11:47:05  
Nomor Resi : 9010322

Judul Penelitian :

- PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DIMEDIASI GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE

*\*Mengupload dokumen Surat Keterangan Penelitian*

Melampirkan :

1. KTP/ Tanda Pengenal Lainnya;
2. Surat Pengantar dari Instansi/Institusi.
3. Proposal



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Raya Sukowati No. 255 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433  
 Website <http://dpmtsp.sragenkab.go.id> dan E-mail: [dpmtsp@sragenkab.go.id](mailto:dpmtsp@sragenkab.go.id)  
 SRAGEN - 57211

### **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: 071/L.007/18/2023

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
 2. Peraturan Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktik Kerja Lapangan di Kabupaten Sragen.
- II. Memperhatikan : Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen Nomor: 070/R.007/26/2023, Tanggal 10 Januari 2023
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala DPMTSP Kabupaten Sragen menerbitkan Surat Keterangan Penelitian atas nama:  
 Nama : YUSUF HIDAYAT  
 Pekerjaan : MAHASISWA AKUNTANSI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA  
 Alamat : Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

#### ***Guna melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut:***

- Judul/Tema : "PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DIMEDIASI GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE"
- Waktu : 09 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023
- Lokasi : SKPD se-Kabupaten Sragen; 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan2. Dinas Kesehatan3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang4. Dinas Sosial5. Dinas Tenaga Kerja6. Dinas Lingkungan Hidup7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak10. Dinas Perhubungan11. Dinas Komunikasi dan Informatika12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu14. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata15. Dinas Arsip dan Perpustakaan16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan17. Dinas Peternakan dan Perikanan18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan19. Sekretariat Daerah20. Sekretariat DPRD21. Inspektorat22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan23. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Penanggung Jawab : Dr. Awan Kostrad Diharto, S.E. M.Ag

- IV. Ketentuan yang harus ditaati :
- 1). Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban dan keamanan umum (stabilitas daerah);
  - 2). Sebelum kegiatan dimulai agar terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/penguasa daerah yang akan dijadikan obyek penelitian. Dan setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Sragen;
  - 3). Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ternyata tidak mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka Surat Keterangan Penelitian akan dicabut.
- V. Apabila Surat Keterangan Penelitian ini di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sragen  
 Pada Tanggal : 09 Januari 2023  
 P1. KEPALA DPMTSP  
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan,



**TUGIYONO, SH**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670708 199303 1 010



#### **Surat Keterangan Penelitian ini disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesbangpol sebagai laporan;
2. SKPD se-Kabupaten Sragen;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskumindag, DPMTSP, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Pemohon yang bersangkutan;
5. Arsip.

"Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE-BSSN"

Lampiran 3  
Kuesioner Penelitian

**KUESIONER PENELITIAN**

**A. Identitas Responden**

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami memerlukan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu supaya berkenan mengisi identitas berikut atau memberi tanda check list (√) pada kotak yang tersedia.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
3. Usia : Tahun
4. Jabatan :
5. OPD :
6. Masa Kerja : Tahun

**B. Petunjuk Pengisian Kuesioner**

1. Cara pengisian kuesioner adalah :
  - a. Mohon bantuan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan lengkap dan jujur.
  - b. Semua pertanyaan dijawab dengan cara memberikannya tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang tersedia dan paling tepat.
2. Terdapat lima alternatif pengisian jawaban dengan keterangan sebagai berikut:
  - 1) Sangat Setuju (SS) : Skor 5
  - 2) Setuju (S) : Skor 4
  - 3) Kurang Setuju (KS) : Skor 3
  - 4) Tidak Setuju (TS) : Skor 2
  - 5) Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1



## DAFTAR PERNYATAAN :

## 1. Sistem Informasi Akuntansi

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
Pengelompokan						
1	Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan pada Dinas ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).					
2	Instansi pemerintah membuat laporan keuangan setiap periode akuntansi.					
3	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodic.					
Pengklasifikasian						
1	Instansi pemerintah melakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi.					
2	Instansi Pemerintah melakukan pengklasifikasian transaksi sesuai dengan pos-pos yang semestinya.					
3	Instansi pemerintah melakukan sistem pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan.					
Pencatatan						
1	Setiap transaksi keuangan pada Dinas ini dilakukan analisis transaksi atau identifikasi transaksi.					
2	Pada Dinas ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan.					
3	Setiap transaksi Dinas ini didukung oleh bukti transaksi.					
4	Semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis.					

## 2. Sistem Pengendalian Internal

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
Efisiensi						
1	Pimpinan pada dinas ini selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan barang secara terus menerus untuk penilaian terhadap suatu kualitas pengendalian intern.					

2	Pimpinan selalu melakukan review dan melakukan evaluasi terhadap temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.					
Efektivitas						
1	Informasi yang diungkapkan telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi dilaksanakan secara efektif.					
2	Adanya pemisahan wewenang secara tepat dalam melakukan kegiatan atau transaksi.					
3	Pimpinan telah melakukan analisis resiko secara lengkap, menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap suatu sistem akuntansi.					
Ekonomis						
1	Memiliki otorisasi yang memadai dalam setiap kegiatan operasional yang ada dalam siklus persediaan.					
2	Memiliki supervisi yang memadai untuk setiap kegiatan yang ada.					
3	Menjalankan pemisahan fungsi antara bagian penerimaan dengan penyimpanan barang.					

### 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
Pengetahuan						
1	Akuntansi adalah suatu proses pengidentifiasian, pencatatan, dan pelaporan transaksi, ekonomi dari suatu organisasi / entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan ekonomi oleh pihak yang memerlukan.					
2	Yang diakuntansikan dalam akuntansi keuangan daerah adalah APBD.					
3	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.					
Ketrampilan						

1	Bapak/Ibu mematuhi kewajiban sebagai Pegawai Negri Sipil.					
2	Bapak/Ibu memahami struktur organisasi pada instansi atau dinas tempat kerja.					
3	Jika ada peraturan baru tentang keuangan daerah, pegawai pada bagian keuangan atau akuntansi mendapat sosialisasi dan atau diklat					
4	Dalam melaksanakan tugas diselesaikan secara tepat waktu dan efektif.					
Kemampuan & Pengalaman						
1	Dinas ini mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai.					

## 4. Kualitas Laporan Keuangan

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
Relevan						
1	Informasi laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).					
2	Penyajian atau penerbitan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan periode akuntansi.					
3	Laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan.					
Dapat dibandingkan						
1	Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu.					
2	Informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak berbeda akan menunjukkan simpulan yang berbeda.					
3	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					

4	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi.					
Dapat dipahami						
1	Laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan.					
2	Informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas.					
Andal						
1	Laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang.					
2	Informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.					

#### 5. *Good Government Governance*

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
Partisipasi						
1	Dalam proses barang dan jasa, Instansi menggunakan pers dan <i>e-procurement</i> untuk mengonfirmasikan pelelangan secara terbuka kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pekerjaan tersebut.					
2	Dalam pengambilan kebijakan, OPD selalu mempertimbangkan masukan dari masyarakat.					
Akuntabilitas						
1	Saya pejabat OPD setuju apabila PEMDA memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyatnya.					
2	Saya selaku pejabat OPD selalu siap untuk diaudit baik pemeriksa eksternal maupun internal sebagai wujud akuntabilitas publik atas pengguna anggaran.					
Integritas						

1	Saya berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan sebagai pegawai OPD.					
2	Saya dalam melaksanakan kegiatan mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi dan golongan.					
3	Saya menggunakan aturan dan hukum dalam melaksanakan kegiatan.					
4	Saya menggunakan pedoman kebijakan pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan					

Lampiran 4  
Data Penelitian

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI										SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL							
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	3	4	5	5	5	5
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4

4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3
5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4
5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	3	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4
3	4	5	5	5	5	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4







5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	4	5	5	5	4	3
4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	2	4	5	5	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	4	5	5	5	4	2
4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	5	4	4	5	3	4
5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	1	4	3	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	5	4	4	5	3	4
4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	4	4	4	4	4	2
4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	1	4	4	4	4	4	2
4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	3
5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4
4	3	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5
4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3



GOOD GOVERNANCE GOVERNEMENT							
Y2.1	Y2.2	Y2.3	Y2.4	Y2.5	Y2.6	Y2.7	Y2.8
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5
3	3	4	4	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	5	5	5	5
5	4	4	4	5	5	5	5
5	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	4	5	5	4
5	4	5	5	4	5	5	4
5	4	5	5	4	5	5	4
4	3	3	3	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	5	5
3	3	2	5	5	5	5	5
5	2	2	5	5	5	5	4
4	3	2	5	5	5	5	4
4	5	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	5	5	5	5
5	4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5

4	4	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	5	4	4	4
4	3	3	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	4	4	5	5	5
4	4	4	4	5	5	5	5
5	5	4	5	4	4	5	5
4	5	4	4	4	4	4	4
5	3	3	4	5	4	4	4
4	4	4	4	5	4	4	4
4	3	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	1
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	5
5	4	5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	4	4	4	4
5	2	2	5	5	4	5	5
5	4	3	5	4	4	5	4
5	2	2	5	5	5	4	5
4	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	5	5	5	5
4	4	4	5	5	4	5	5
4	4	4	5	5	4	5	5
5	4	4	4	5	5	5	5

Lampiran 5  
 Hasil Uji Validitas Konvergen

	GGG	KLK	KSDM	SIA	SPI
X1.1				0.859	
X1.2				0.877	
X1.3				0.870	
X1.4				0.861	
X1.5				0.869	
X1.6				0.817	
X1.7				0.756	
X1.8				0.814	
X1.9				0.736	
X2.1					0.792
X2.2					0.824

X2.3					0.808
X2.4					0.786
X2.5					0.798
X3.1			0.705		
X3.2			0.920		
X3.3			0.901		
X3.4			0.788		
X3.5			0.807		
Y1.1		0.861			
Y1.2		0.867			
Y1.3		0.808			
Y1.4		0.809			
Y2.1	0.805				
Y2.2	0.875				

Y2.3	0.889				
Y2.4	0.811				



Lampiran 6  
Uji Validitas Driskiminan

	GGG	KLK	KSDM	SIA_	SPI
GGG	0.846				
KLK	0.514	0.837			
KSDM	0.567	0.672	0.828		
SIA_	0.589	0.662	0.606	0.830	
SPI	0.587	0.599	0.524	0.525	0.802

Lampiran 7  
Uji Reliabilitas

	GGG	KLK	KSDM	SIA_	SPI
GGG	0.846				
KLK	0.514	0.837			
KSDM	0.567	0.672	0.828		
SIA_	0.589	0.662	0.606	0.830	
SPI	0.587	0.599	0.524	0.525	0.802

Lampiran 8  
Direct Effect & Indirect Effect

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
GGG -> KLK	-0.035	-0.051	0.168	0.207	0.836
KSDM -> GGG	0.229	0.235	0.143	1.601	0.110
KSDM -> KLK	0.354	0.356	0.121	2.930	0.004
SIA_ -> GGG	0.283	0.284	0.153	1.846	0.065
SIA_ -> KLK	0.332	0.353	0.138	2.408	0.016
SPI -> GGG	0.318	0.318	0.122	2.613	0.009
SPI -> KLK	0.260	0.259	0.137	1.892	0.059

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
GGG -> KLK					
KSDM -> GGG					
KSDM -> KLK	-0.008	-0.014	0.049	0.163	0.871
SIA_ -> GGG					
SIA_ -> KLK	-0.010	-0.019	0.057	0.174	0.862
SPI -> GGG					
SPI -> KLK	-0.011	-0.013	0.058	0.190	0.849

Lampiran 9  
Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Data Pribadi

Nama Lengkap : Yusuf Hidayat  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sragen, 08 Desember 1999  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
No. Telp. : 085800656458  
E-mail : [Yusufalhidayat87@gmail.com](mailto:Yusufalhidayat87@gmail.com)

Pendidikan Formal

1. TK RA Al-Munir (2005-2006) Jakarta
2. SD Negeri Sukaresmi (2006-2011) Jakarta
3. MI Negeri 3 Ngijo (2011-2012) Sragen
4. MTs Negeri 2 Tanon (2012-2015) Sragen
5. MA Negeri 2 Sragen (2015-2018) Sragen
6. UIN Raden Mas Sa'id Surakarta (2019-2023) Sukoharjo

Lampiran 10  
Bukti Cek Plagiasi

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Good Government Governance

ORIGINALITY REPORT			
<b>22%</b>	<b>32%</b>	<b>20%</b>	<b>18%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
<b>1</b>	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet Source		<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>repository.umsu.ac.id</b> Internet Source		<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>repository.upiypk.ac.id</b> Internet Source		<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>eprints.undip.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>eprints.upnyk.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>